

**IMPLIKASI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEBIJAKAN
DI MI MA'ARIF NGADIKERSO KECAMATAN SAPURAN KABUPATEN
WONOSOBO**



Oleh:

FACHRY ALI

NIM: 22204091009

TESIS

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
Diajukan Kepada Program Magister UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Pendidikan
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 513056 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1478/Un.02/DT/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : IMPLIKASI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT TERHADAP PENGAMBILAN
KEPUTUSAN KEBIJAKAN DI MI MA'ARIF NGADIKERSO KECAMATAN
SAPURAN KABUPATEN WONOSOBO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FACHRY ALI, S.Pd
Nomor Induk Mahasiswa : 22204091009
Telah diujikan pada : Jumat, 14 Juni 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Sumedi, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66c5bc0baac4b



Penguji I

Prof. Dr. Subiyantoro, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66c943c64565e



Penguji II

Dr. Sabarudin, M.Si
SIGNED

Valid ID: 66b1dae766d8f



Yogyakarta, 14 Juni 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Prof. Dr. Hj. Sri Sumarni, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 66c9998148a01

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Fachry Ali
NIM: 22204091009
Jenjang: Magister (S2)
Program Studi: Manajemen Pendidikan Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Wonosobo, 22 Mei 2024

Yang menyatakan



Fachry Ali, S.Pd
22204091009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Fachry Ali
NIM: 22204091009
Jenjang: Magister (S2)
Program Studi: Manajemen Pendidikan Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Wonosobo, 22 Mei 2024

Yang menyatakan



Fachry Ali, S.Pd
22204091009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Yth.
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah
dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**IMPLIKASI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT TERHADAP
PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEBIJAKAN DI MI MA'ARIF
NGADIKERSO KECAMATAN SAPURAN KABUPATEN WONOSOBO**

yang ditulis oleh:

Nama: Fachry Ali
NIM: 22204091009
Jenjang: Magister (S2)
Program Studi: Manajemen Pendidikan Islam

Peneliti berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program Magister (S2) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd). Wassalamuaalaikum wr.wb.

Yogyakarta, 23 Mei 2024

Pembimbing,



Dr. H. Sumedi, M.Ag.

NIP: 19610217 199803 1 001

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

PERSETUJUAN TIM PENGUJI


UJIAN TESIS

Tesis Berjudul:

IMPLIKASI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT TERHADAP PENGAMBILAN
KEPUTUSAN KEBIJAKAN DI MI MA'ARIF NGADIKERSO KECAMATAN
SAPURAN KABUPATEN WONOSOBO

Nama : Fachry Ali
NIM : 2204091009
Program Studi : MPI
Konsentrasi : Manajemen Pendidikan Islam

Telah disetujui tim penguji untuk munaqosyah

Ketua Sidang : Dr. H. Sumedi, M.Ag. ()
Penguji I : Prof. Dr. Subiyantoro, M.Ag. ()
Penguji II : Dr. Sabarudin, M.Si ()

Diuji di Yogyakarta pada:

Tanggal : Jum'at, 14 Juni 2024

Pukul : 13.00-14.00 WIB

Hasil : A-

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝ ١١٤ (طه/20):

(114-114)

"Dan katakanlah: 'Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.'"

(QS. Taha: 114)¹



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Al Qur'an Terjemahan Kemenag 2002. QS Taha Ayat 114.

ABSTRAK

Fachry Ali, 22204091009, Implikasi Sosial Budaya Masyarakat Terhadap Pengambilan Keputusan Kebijakan di Mi Ma'arif Ngadikerso Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo. Tesis. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2024.

Manajemen Pendidikan madrasah yang baik adalah yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat terhadap setiap kebijakan Pendidikan yang diputuskan. MIS Ma'arif Ngadikerso adalah madrasah yang berada ditengah-tengah sosial budaya masyarakat yang berada di Kaki Gunung Sumbing Desa Ngadikerso, Sapuran, Wonosobo. Maka dari itu penelitian ini dilakukan guna mengetahui: (1) bagaimana bentuk-bentuk sosial budaya masyarakat Desa Ngadikerso Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo, (2) bagaimana manajemen pendidikan di MI Ngadikerso Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo dan (3) bagaimana implikasi sosial budaya masyarakat dan manajemen Pendidikan terhadap pengambilan keputusan kebijakan di MI Ngadikerso Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo.

Untuk menjawab persoalan diatas, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan viiiaying wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyampaian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian: 1) Bentuk sosial budaya di Desa Ngadikerso terlihat dari nilai gotong royong yang muncul dalam kegiatan seperti pembangunan jalan dan perayaan hari besar Islam. Tradisi lokal, termasuk hari pasaran dan karnaval HUT RI, memperkuat solidaritas komunitas, sementara praktik keagamaan seperti sholawat dan ziarah mempererat ikatan sosial. Mata pencaharian utama sebagai petani di kaki Gunung Sumbing membentuk struktur sosial yang khas. 2) pengambilan keputusan kebijakan dilakukan secara sistematis melalui perumusan masalah, prediksi kebijakan, dan evaluasi kinerja. Proses dimulai dengan identifikasi masalah secara mendalam, diikuti dengan analisis normatif dan evaluatif untuk prediksi kebijakan. 3) Implikasi sosial budaya terhadap kebijakan pendidikan menunjukkan perlunya perhatian terhadap nilai dan tradisi lokal, komunikasi, partisipasi masyarakat, agama, harapan masyarakat, serta perubahan sosial.

Kata Kunci: Sosial Budaya, Masyarakat, Manajemen Pendidikan, Kebijakan Pendidikan

ABSTRACT

Fachry Ali, 22204091009, *Social and Cultural Implications on Policy Decision-Making at Mi Ma'arif Ngadikerso, Sapuran District, Wonosobo Regency. Thesis. Islamic Education Management Study Program, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, UIN Sunan Kalijaga, 2024.*

Effective madrasa educational management is one that integrates the social and cultural values of the community into every educational policy decision. MIS Ma'arif Ngadikerso is a madrasa situated within the socio-cultural milieu of the community at the foot of Mount Sumbing, Ngadikerso Village, Sapuran, Wonosobo. Therefore, this research aims to understand: (1) the forms of social and cultural life of the community in Ngadikerso Village, Sapuran District, Wonosobo Regency, (2) the educational management at MI Ngadikerso, Sapuran District, Wonosobo Regency, and (3) the implications of the community's social and cultural life and educational management on policy decision-making at MI Ngadikerso, Sapuran District, Wonosobo Regency.

To address these issues, the researcher employed a descriptive qualitative approach. Data collection was conducted through interviews, observations, and documentation. Data analysis involved data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

Research Findings: 1) The social and cultural forms in Ngadikerso Village are evident from the value of mutual cooperation, which is manifested in activities such as road construction and celebrations of Islamic holidays. Local traditions, including market days and Independence Day parades, strengthen community solidarity, while religious practices such as recitations and pilgrimages reinforce social bonds. The primary occupation as farmers at the foot of Mount Sumbing shapes a distinct social structure. 2) Policy decision-making is conducted systematically through problem formulation, policy prediction, and performance evaluation. The process begins with a thorough problem identification, followed by normative and evaluative analysis for policy prediction. 3) The social and cultural implications for educational policy highlight the need to consider local values and traditions, communication, community participation, religion, public expectations, and social changes.

Keywords: *Social and Cultural, Community, Educational Management, Educational Policy*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu pedoman transliterasi yang berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987. Berikut adalah daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	£	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	¥	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	©	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	i	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	«	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	-	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	§	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	ghain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	waw	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	<i>Muta‘addidah</i> <i>‘iddah</i>
---------------	-----------------	--------------------------------------

C. Ta’ Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	ditulis ditulis	<i>hibbah</i> <i>Jizyah</i>
----------	--------------------	--------------------------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya,

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الولياء	Ditulis	<i>Karāmah alauliyā`</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul fī-r</i>
------------	---------	---------------------

D. Vokal Pendek

-	<i>fa`-ah</i>	A
-	<i>Kasrah</i>	I
-	<i>«amah</i>	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
fathah + ya' mati تَنَسَّى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furū«</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya mati يَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	ditulis ditulis	<i>a`antum</i>
--------	-----------------	----------------

اعددت لئن شكرتم	Ditulis	<i>u'iddat</i> <i>la'in syakartum</i>
--------------------	---------	--

H. Kata Sambung Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	<i>alQur`ān</i>
القياس	ditulis	<i>alQiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya

السماء	ditulis	<i>alSamā`</i>
الشمس	ditulis	<i>alSyams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkain Kalimat

زوي الفروضا هل السنة	ditulis ditulis	<i>zawī alfurū`</i> <i>hal alsunnah</i>
----------------------	-----------------	--

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat luar biasa, kesempatan, kekuatan, dan ilmu pengetahuan, serta memperkenalkan peneliti pada cinta yang penuh kesabaran sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya ini tepat waktu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Semua usaha peneliti hingga saat ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan dorongan dari banyak pihak yang luar biasa. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M. A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Hj. Sri Sumarni, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarniyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. H. Karwadi S.Ag., M.Ag. selaku ketua Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarniyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Dr. Nur Saidah, S.Ag., M.Ag. selaku sekretaris Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarniyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. H. Sumedi, M.Ag. selaku pembimbing yang senantiasa meluangkan waktunya disela kesibukan untuk membantu,

membimbing, mengarahkan, memberikan kritik dan saran dengan penuh ketelitian sehingga penyusunan tesis ini terselesaikan.

6. Seluruh dosen Program Magister Manajemen Pendidikan Islam yang telah berkontribusi nyata dengan memberikan ilmu, berbagai wawasan dan pengalaman selama peneliti menempuh perkuliahan.
7. Kedua orang tua Terima kasih atas doa, dukungan moral, dan motivasi yang tiada henti. Kasih xvaying dan pengorbanan kalian adalah sumber kekuatan terbesar bagi peneliti.
8. Civitas MIS Ma'arif Ngadikerso yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan berkenan menjadi narasumber.
9. Salsabilla Nurusyifa, yang senantiasa membersamai peneliti dan tidak pernah henti mengingatkan dan mendukung peneliti dalam mengerjakan penelitian ini.
10. Teman-Teman Magister Manajemen Pendidikan Islam, yang telah membersamai peneliti dan berjuang bersama untuk menulis dan berdiskusi dengan segala keterbatasan ilmu peneliti sehingga segala bentuk hasilnya adalah proses perjuangan yang nyata.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu baik yang terlibat langsung maupun tidak dalam proses penelitian ini, terimakasih telah memberikan sumbangsih pemikiran, pengalaman dan lain semacamnya demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan tesis ini.

Sebagai penutup dari kata pengantar ini, peneliti ingin mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi berharga dalam penyusunan karya ini. Proses penelitian dan penulisan ini tidak akan mungkin terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peneliti juga menyadari bahwa setiap langkah dalam pembuatan kebijakan yang dibahas dalam penelitian ini merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen bersama. MI Ma'arif Ngadikerso telah menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui pendekatan yang sistematis dan reflektif. Harapan peneliti adalah bahwa temuan dan analisis dalam karya ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kebijakan pendidikan di masa mendatang dan memberikan manfaat yang nyata bagi komunitas pendidikan.

Akhir kata, peneliti berharap karya ini dapat memberikan inspirasi dan menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pembaca, peneliti, dan praktisi di bidang pendidikan. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya.

Penulis

Yogyakarta, 07/06/2024

Fachry Ali

PERSEMBAHAN

Tesis ini Penulis persembahkan kepada Almamaterku Tercinta

Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	vi
MOTTO.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A Latar Belakang.....	1
B Rumusan Masalah.....	7
C Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D Kajian Pustaka.....	9
E Kajian Teoritik.....	12
F Metode Penelitian.....	62
G Sistematika Penulisan.....	68
BAB II : GAMBARAN UMUM MIS MA'ARIF NGADIKERSO....	70
A Letak Geografis.....	70
B Sejarah.....	72
C Visi, Misi, Tujuan.....	74
D Data Madrasah.....	77
BAB III : SOSIAL BUDAYA MASYARKAT DESA NGADIKERSO...	82
A Gotong Royong.....	82
B PHBI.....	84
C Hari Pasaran.....	91
D Kegiatan Keagamaan.....	95
E Karnaval.....	99
F Mata Pencaharian.....	102
BAB IV : PROSES PENGAMBILAN KEBIJAKAN MI MA'AARIF NGADIKERSO.....	104
A Manajemen Pendidikan MI Ma'arif Ngadikerso.....	104
B Proses Pengambilan Kebijakan di MI Ma'arif Ngadikerso.....	119
IMPLIKASI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT	
BAB V : TERHADAP PENGAMBILAN KEBIJAKAN DI MI MA'ARIF NGADIKERSO.....	141

A Pengaruh Terhadap Nilai-nilai dan Tradisi Lokal.....	141
B Pengaruh Terhadap Bahasa dan Komunikasi.....	148
C Pengaruh Terhadap Partisipasi Masyarakat.....	160
D Pengaruh Terhadap Agama dan Kepercayaan.....	167
E Pengaruh Terhadap Pemenuhan Harapan Masyarakat.....	171
F Pengaruh Terhadap Perubahan Sosial dan Demografis.....	174
BAB VI : PENUTUP.....	177
A Kesimpulan.....	177
B Saran.....	178
DAFTAR PUSTAKA.....	180
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	188



DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Data Kepegawaian MIS Ma'arif Ngadikerso.....52
2. Tabel 2 Jumlah Siswa MIS Ma'arif Ngadikerso berdasarkan kelas.....5



DAFTAR GAMBAR

1. **Gambar 2.1 Struktur Organisasi MIS Ma'arif Ngadikerso.....54**
2. **Gambar 3.1 Kegiatan Maulid di Desa Ngadikerso.....61**
3. **Gambar 3.2 Kegiatan Rajaban di Desa Ngadikerso.....63**
4. **Gambar 3.3 Kegiatan Selapanan di Desa Ngadikerso.....65**
5. **Gambar 3.4 Kegiatan Ruwahan di Desa Ngadikerso.....66**
6. **Gambar 4.1 Bagan Proses Pembuatan Kebijakan..... 97**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keragaman budaya dan nilai-nilai masyarakat Indonesia merupakan kekayaan yang harus dijaga dan dilestarikan. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan pendidikan dan pengembangan masyarakat di Indonesia. Sosial budaya dan nilai-nilai masyarakat adalah dua konsep yang saling terkait dan memengaruhi satu sama lain. Nilai-nilai budaya merupakan inti dari aspek sosial budaya dan membentuk dasar perilaku dan identitas individu dalam masyarakat. Memahami hubungan ini penting dalam konteks analisis sosial, antropologi budaya, dan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika masyarakat.¹

Nilai-nilai sosial budaya masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap manajemen pendidikan di sekolah. Pengaruh tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari pembentukan karakter siswa melalui integrasi nilai-nilai budaya dalam kurikulum pendidikan hingga peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan di sekolah melalui program-program yang melibatkan mereka.² Selain itu, nilai-nilai budaya juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperkaya pengalaman

¹ Syarifuddin, Syarifuddin. "Peran Budaya Maulid Dalam Merekatkan Hubungan Sosial Masyarakat Barabai Utara (Studi Deskriptif Analisis Terhadap Pengembangan Nilai-Nilai Budaya Pendidikan IPS)." *Jurnal Al-Madrasah Vol. 4, No. 1, Juli-Desember 2019*: 125-140.

² Nurdin, Diding and Sofyan Sauri. "Model Manajemen Pendidikan Nilai Berbasis Sekolah, Keluarga, Dan Masyarakat." *Jurnal Administrasi Pendidikan VolXIV No. 1 April 2012*. 185-196.

pembelajaran di sekolah dan mempromosikan keberlanjutan budaya setempat. Kerjasama antara sekolah dan masyarakat juga menjadi lebih erat ketika nilai-nilai sosial budaya diperhatikan dalam pengambilan keputusan kebijakan di sekolah.³ Oleh karena itu, manajemen pendidikan di sekolah perlu memahami dan mengintegrasikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat sebagai bagian integral dari proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih relevan dan berkelanjutan.

Manajemen pendidikan yang baik atau buruk memiliki dampak yang signifikan terhadap pengambilan keputusan kebijakan di sekolah.⁴ Manajemen pendidikan yang baik membawa dampak positif, seperti meningkatkan efektivitas kebijakan dengan pengumpulan data akurat dan pengembangan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga meningkat, berkat program-program yang melibatkan mereka dalam pendidikan, serta kualitas pendidikan yang ditingkatkan melalui integrasi nilai-nilai budaya.⁵ Di sisi lain, manajemen pendidikan yang buruk membawa dampak negatif, seperti menurunkan efektivitas kebijakan karena kurangnya pengumpulan data akurat dan pengembangan program yang sesuai dengan kebutuhan. Partisipasi

³ Sanjaya, Ivan, Suswandari Suswandari and Rudy Gunawan. "Nilai-nilai tradisi budaya Cap Go Meh pada masyarakat Cina Benteng di Tangerang sebagai sumber pembelajaran di sekolah." *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 6(2), 385–402.

⁴ Hayati, Fitriah, Riri Zulvira and Nurhizrah Gistituati. "Lembaga pendidikan: kebijakan dan pengambilan keputusan." *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* Vol.6, No.1, 2021, pp. 100-104

⁵ Irfan, Muhammad, Abdul Rahman and Latri Aras. "Makin Dekat, Makin Cepat: Pengaruh Pokja Manajemen Operasional dalam Implementasi Program Sekolah Penggerak." *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan* 7(1), (2023): 11–18. <https://doi.org/10.23887/jppp.v7i1.56914>

masyarakat dalam pengambilan keputusan juga menurun karena kurangnya program yang melibatkan mereka, dan kualitas pendidikan dapat terganggu karena kurangnya integrasi nilai-nilai budaya dalam pembelajaran.⁶

Ketidaksesuaian antara budaya masyarakat, manajemen pendidikan, dan kebijakan pendidikan dapat menjadi tantangan serius yang memengaruhi kualitas pendidikan di sekolah. Tantangan-tantangan ini mencakup perbedaan nilai dan budaya yang dapat menghambat pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dukungan yang kurang dari manajemen pendidikan, serta keterbatasan sumber daya seperti dana dan fasilitas pendidikan.⁷ Selain itu, perbedaan interpretasi kebijakan juga dapat mengakibatkan hambatan dalam implementasi kebijakan pendidikan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan kerjasama antara masyarakat, manajemen pendidikan, dan kebijakan pendidikan dalam proses pengambilan keputusan pendidikan. Selain itu, penting bagi manajemen pendidikan untuk memahami dan memperhatikan nilai-nilai dan budaya masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan kebijakan pendidikan di sekolah. Dengan cara

⁶ Kiwang, Amir Syarifudin, David B. W. Pandie and Frans Gana. "Analisis Kebijakan dan Efektivitas Organisasi." *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik JKAP* Vol 19 No 1 - Mei 2015. 71-84

⁷ Patras, Yuyun Elizabeth, Agus Iqbal, Papat Papat and Yulianis Safrinadiya Rahman. "Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah Dan Tantangannya." *Jurnal Manajemen Pendidikan* Vol.7, No.2, Juli 2019. 800-807.

ini, kebijakan pendidikan dapat diimplementasikan secara efektif sesuai dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai.⁸

Terdapat fakta sosial dan fakta budaya yang menarik di Desa Ngadikerso Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo yaitu posisi desa yang jauh dari pasar sebagai tempat pemenuhan kebutuhan masyarakat Desa Ngadikerso yaitu Pasar Sapuran. Masyarakat Desa Ngadikerso memiliki kebiasaan untuk berkunjung ke pasar tiap hari pasaran jawa *wage* dan *pahing*, karena pasar sapuran yang dilberlakukan pada tiap hari pasaran jawa *wage* dan *pahing*. Menurut observasi⁹ dan wawancara peneliti dengan kepala sekolah MI Ngadikerso, dahulu sering kali siswa tidak hadir pada pembelajaran saat hari *wage* dan *pahing* dikarenakan harus memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melihat fenomena tersebut akhirnya pihak MI Ngadikeso melakukan upaya komunikasi kepada mnasyarakat atau walimurid agar siswa dianjurkan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran terlebih dahulu.¹⁰

Dalam perspektif manajemen pendidikan, perubahan pola kehadiran siswa ke sekolah yang dijelaskan dalam situasi tersebut mencerminkan pentingnya komunikasi dan kolaborasi antara sekolah dan masyarakat dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh siswa dan keluarganya. Pada awalnya, siswa harus absen sekolah setiap hari *wage* dan *pahing* karena keterbatasan

⁸ Permana, Ibar Adi and Jajat Sudrajat. "Pengelolaan Manajemen dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Mutu Pendidikan." *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5(5), 2022. 1479-1487.

⁹ Observasi Peneliti di Desa Ngadikerso Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo pada 19 Desember 2023 pukul 10.00 WIB

¹⁰ Wawancara dengan kepala sekolah MI Ngadikerso Sapuran pada 19 September 2023 pukul 09.00 WIB di Wonosobo.

aksesibilitas ke pasar yang jauh. Namun, melalui komunikasi yang efektif antara sekolah dan warga, mereka mencapai solusi yang menguntungkan untuk pendidikan anak-anak.

Pertama, kebijakan di mana siswa diizinkan untuk hadir di sekolah hingga pukul 10.00 pada hari *wage* dan *pahing* menunjukkan fleksibilitas dalam manajemen pendidikan. Pihak sekolah memahami pentingnya pendidikan dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengikuti pembelajaran sebelum berangkat ke pasar. Ini mencerminkan tanggung jawab sekolah dalam memastikan akses pendidikan yang setara bagi semua siswa. Kedua, pendekatan ini mencerminkan kolaborasi positif antara sekolah dan keluarga siswa. Orang tua siswa berkomunikasi dengan sekolah dan mengajukan permohonan agar anak-anak mereka dapat mengikuti pembelajaran sebelum pergi ke pasar. Hal ini menunjukkan keterlibatan aktif orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka dan bahwa sekolah menghargai kebutuhan spesifik dari masyarakat lokal.

Dalam konteks manajemen pendidikan, situasi ini menekankan pentingnya beradaptasi dengan perubahan dalam kebutuhan dan budaya masyarakat. Melalui dialog dan komunikasi terbuka antara pihak sekolah dan masyarakat, solusi yang berorientasi pada siswa dapat dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen pendidikan yang efektif tidak hanya melibatkan pengelolaan sumber daya fisik dan kurikulum, tetapi juga keterlibatan aktif dengan stakeholder (termasuk orang tua dan masyarakat)

untuk membuat keputusan kebijakan yang memastikan pendidikan yang lebih baik bagi siswa.

Fenomena sosial yang lain adalah dengan kesibukan orang tua siswa MI Ngadikerso Kecamatan Sapuran yang berprofesi sebagai petani kurang bisa memberikan waktu untuk anaknya, ada peristiwa di mana terdapat siswa MI Ngadikerso yang harus membawa adiknya yang masih balita ke sekolah atau dalam istilah masyarakat setempat yaitu *momong*¹¹ di MI Ngadikerso. Hal itu bisa terjadi karena orang tua dari siswa tersebut berada di ladang untuk Bertani memenuhi kebutuhan keluarga. Melihat fenomena tersebut sekolah memperbolehkan siswa tersebut membawa adiknya kedalam ke kelas dengan alasan agar siswanya tetap mau belajar di sekolah.¹²

Fenomena di atas menunjukkan tantangan sekolah dalam menghadapi sosial budaya masyarakat yang khas. Dalam perspektif manajemen pendidikan, tindakan sekolah yang memperbolehkan siswa MI Ngadikerso membawa adiknya ke sekolah sebagai *momongan* mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab sekolah dalam merespons realitas sosial dan ekonomi komunitas lokal. Hal ini mencerminkan keterlibatan sosial yang dipahami oleh sekolah terhadap tantangan yang dihadapi siswa dan keluarga mereka, memperlihatkan fleksibilitas dalam kebijakan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam, menegaskan pentingnya menjaga akses pendidikan bagi semua

¹¹ Istilah *momong* biasa diartikan sebagai mengasuh, lebih tepatnya yaitu mengasuh anak.

¹² Wawancara dengan kepala sekolah MI Ngadikerso Sapuran pada 19 September 2023 pukul 09.00 WIB di Wonosobo.

siswa, termasuk mereka yang memiliki tanggung jawab tambahan, dan menyoroti kolaborasi yang efektif antara sekolah dan orang tua dalam mendukung pendidikan anak-anak. Pendekatan ini mencerminkan pentingnya pendidikan yang inklusif dan berfokus pada kepentingan siswa serta responsibilitas sekolah dalam menghadapi realitas sosial dan ekonomi masyarakat lokal.

Berdasarkan uraian dan fakta peristiwa sosial di atas maka peneliti tertarik untuk melaksanakan sebuah penelitian yang berjudul **Implikasi Sosial Budaya Masyarakat dan Manajemen Pendidikan terhadap Pengambilan Keputusan Kebijakan di MI Ngadikerso.**

B. Rumusan Masalah

Dari fokus permasalahan dalam penelitian ini maka peneliti menjabarkan fokus permasalahan menjadi rumusan masalah dalam bentuk kalimat tanya. Adapun pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana bentuk-bentuk sosial budaya masyarakat Desa Ngadikerso Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo?
2. Bagaimana pengambilan kebijakan di MI Ngadikerso Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo?
3. Bagaimana implikasi sosial budaya masyarakat terhadap pengambilan keputusan kebijakan di MI Ngadikerso Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Guna menganalisis bentuk-bentuk sosial budaya masyarakat Desa Ngadikerso Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo
- b. Guna menganalisis proses pengambilan kebijakan di MI Ngadikerso Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo
- c. Guna menganalisis implikasi sosial budaya masyarakat terhadap pengambilan keputusan kebijakan di MI Ngadikerso Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Pemahaman yang Lebih Mendalam: Penelitian ini dapat menyumbangkan pengetahuan baru dalam bidang pendidikan dan manajemen pendidikan, terutama dalam kaitannya dengan hubungan antara aspek sosial budaya masyarakat dan pengambilan keputusan kebijakan di lingkungan sekolah.
- 2) Pengembangan Teori: Hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan teori-teori yang ada, terutama dalam menggali lebih dalam tentang bagaimana faktor sosial budaya memengaruhi proses pengambilan keputusan kebijakan di sekolah.
- 3) Dasar Penelitian Lanjutan: Penelitian ini dapat memberikan dasar bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam tentang peran sosial

budaya dan manajemen pendidikan dalam proses pengambilan kebijakan di sekolah.

b. Manfaat Praktis

- 1) Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan: Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana faktor sosial budaya memengaruhi pengambilan keputusan kebijakan di MI Ngadikerso, sekolah dapat meningkatkan kualitas kebijakan mereka, sehingga lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
- 2) Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat: Hasil penelitian dapat membantu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan di sekolah, karena masyarakat akan lebih memahami bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi budaya dan nilai-nilai mereka.
- 3) Rekomendasi Kebijakan: Temuan penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih baik dalam konteks pendidikan dan manajemen pendidikan di MI Ngadikerso.

D. Kajian Pustaka

Salah satu langkah penting dalam proses penelitian adalah kajian pustaka. Dalam kajian ini, peneliti mengumpulkan, meninjau, menganalisis, dan mensintesis literatur, jurnal, buku, artikel, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian mereka. Tujuan utama dari

penelitian literatur adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang status penelitian saat ini tentang subjek yang diteliti, menemukan celah pengetahuan, dan memperoleh pengetahuan yang dapat digunakan untuk merancang dan melaksanakan penelitian itu sendiri. Ini adalah penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tesis ini:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Umiati Jawas pada tahun 2017 yang berjudul *The Influence of Socio-Cultural Factors on Leadership Practices For Instructional Improvement In Indonesian Schools*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami pengaruh faktor sosial-budaya terhadap praktik kepemimpinan dalam meningkatkan pembelajaran di sekolah-sekolah Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa praktik kepemimpinan di sekolah-sekolah Indonesia dipengaruhi oleh faktor sosial-budaya.¹³

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh U Jawas dengan penelitian ini adalah membahas mengenai bagaimana dampak dari sosial budaya suatu masyarakat dan manajemen sekolah. Namun perbedaannya terletak pada penelitian U Jawas membahas dampaknya pada kemajuan sekolah sedangkan penelitian ini membahas dampaknya pada pengambilan keputusan kebijakan.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Eddy Setyanto, Matin and Totok Amin Soefijanto, berjudul *Evaluation of Culture-Based Education Policy*

¹³ Umiati Jawas. The Influence of Socio-Cultural Factors on Leadership Practices For Instructional Improvement In Indonesian Schools. *Journal School Leadership & Management*, 2017. 1-20. DOI: 10.1080/13632434.2017.1366440.

Implementation and Management at High School pada tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pendidikan berbasis budaya di tingkat sekolah menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan berbasis budaya di tingkat sekolah menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, masih belum sepenuhnya memenuhi kriteria evaluasi yang ditetapkan.¹⁴

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Eddy dkk dengan penelitian ini adalah pada pembahasan kebijakan, jurnal ini membantu peneliti memberikan gambaran terkait bagaimana proses hingga evaluasi sebuah kebijakan Pendidikan. Sedangkan perbedaannya terlihat pada lokasi penelitian dalam penelitian Eddy dkk ada di Yogyakarta sedangkan penelitian berada di Wonosobo. Tentu latarbelakang pola pikir antara masyarakat kota dengan pedesaan berbeda perspektifnya terhadap Pendidikan. Selain itu nilai-nilai sosial budaya lokasi penelitian Eddy dengan penelitian ini berbeda.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh B.M.A.S. Anaconda Bangkara dkk pada tahun 2022 berjudul *Relevance of Education Policy and Implementation in Indonesia: A Study of the Public Service Literature*. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi relevansi kebijakan dan pelaksanaan pendidikan di Indonesia serta memberikan pemahaman

¹⁴ Eddy Setyanto, Matin and Totok Amin Soefijanto. Evaluation of Culture-Based Education Policy Implementation and Management at High School. *International Journal of Advanced Research (IJAR)* 7(11) 2019. 633-641. DOI: 10.21474/IJAR01/10051

tentang isu-isu terkait kebijakan dan pelaksanaan pendidikan melalui tinjauan literatur. Hasil dari peneliti ini yaitu, bahwa pelaksanaan kebijakan pendidikan sangat terkait dengan administrasi pendidikan dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.¹⁵

Persamaan penelitian Bangkara dkk dengan penelitian ini adalah dari segi pembahasan sama hal nya membahas terkait kebijakan pendidikan sedangkan perbedaanya adalah penelitian Bangkara dkk tidak membahas mengenai proses pembuatan kebijakan yang terdampak sosial budaya masyarakat.

E. Kajian Teoritik

1. Konsep Sosial Budaya Masyarakat

a. Teori Budaya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya atau culture dapat diartikan sebagai pikiran, akal budi, dan hasil karya manusia.

Membudayakan berarti mengajarkan agar memiliki budaya, mendidik agar berbudaya, serta membiasakan sesuatu yang baik sehingga menjadi bagian dari budaya.¹⁶

Dalam bahasa Sansekerta kata kebudayaan berasal dari kata budh yang berarti akal, yang kemudian menjadi kata budhi atau

¹⁵ Bangkara, B. A., Pattiasina, P. J., Fatmawati, E., Heryani, A., & Damayanto, A. Relevance of education policy and implementation in Indonesia: A study of the public service literature. *Linguistics and Culture Review*, Vol 6 No (S5), (2022). 216-232.

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 130-131.

bh budaya sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil pemikiran atau akal manusia. Pendapat lain mengatakan bahwa budaya berasal dari kata budi dan daya. Budi adalah akal yang merupakan unsur rohani dalam kebudayaan, sedangkan daya adalah perbuatan atau ikhtiar sebagai unsur jasmani. Sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil dari akal dan ikhtiar manusia.¹⁷

Pengertian budaya atau kebudayaan menurut beberapa ahli sebagaimana disebutkan oleh Elly. M. Setiadi, sebagai berikut:

- 1) E.B Tylor (1832-1917), budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, adat istiadat, dan kemampuan lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.
- 2) R. Linton (1893-1953), kebudayaan dapat dipandang sebagai konfigurasi tingkah laku yang dipelajari, di mana unsur pembentuknya didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat lainnya.
- 3) Herkovits (1885-1963), kebudayaan adalah bagian dari lingkungan hidup yang diciptakan oleh manusia.¹⁸

Dari pengertian di atas dapat peneliti simpulkan Inti dari budaya adalah hasil pemikiran, akal budi, dan usaha manusia yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, adat istiadat, dan tingkah

¹⁷ Supartono Widyosiswoyo, Ilmu Budaya Dasar (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 30-31

¹⁸ Elly. M Setiadi, Ilmu Sosial Budaya Dasar (Jakarta: Kencana 2012), 28

laku yang dipelajari serta bagian dari lingkungan hidup yang diciptakan oleh manusia.

Dalam bukunya "*Universal Categories of Culture*," Kluckhohn membagi kebudayaan di seluruh dunia, baik di masyarakat pedesaan yang sederhana maupun di masyarakat perkotaan yang kompleks, ke dalam beberapa unsur:

- 1) Bahasa: Bahasa adalah alat interaksi sosial manusia dan penting dalam antropologi linguistik. Menurut Keesing, bahasa memungkinkan manusia membangun tradisi budaya, memahami fenomena sosial secara simbolik, dan mewariskannya.
- 2) Pengetahuan: Pengetahuan mencakup sistem peralatan hidup dan teknologi, dan mencerminkan pemahaman manusia tentang alam, tumbuhan, binatang, dan benda-benda di sekitarnya.
- 3) Sosial: Sistem kekerabatan dan organisasi sosial mengatur kehidupan masyarakat melalui adat istiadat dan aturan-aturan dalam kelompok-kelompok sosial, dimulai dari keluarga inti hingga tingkatan lokalitas geografis.
- 4) Peralatan Hidup dan Teknologi: Manusia menciptakan peralatan untuk bertahan hidup. Antropolog awal mempelajari kebudayaan manusia melalui teknologi dan peralatan sederhana yang digunakan masyarakat.

- 5) Mata Pencaharian Hidup: Penelitian etnografi memfokuskan pada aktivitas ekonomi masyarakat dan cara mereka mencukupi kebutuhan hidup.
- 6) Religi: Religi berhubungan dengan kepercayaan manusia pada kekuatan gaib atau supranatural dan cara-cara berkomunikasi dengan kekuatan tersebut. Ilmuwan sosial menganggap religi suku-suku bangsa non-Eropa sebagai sisa religi kuno.
- 7) Kesenian: Antropologi seni meneliti aktivitas kesenian tradisional, termasuk patung, ukiran, musik, tari, dan drama. Deskripsi etnografi mencakup teknik dan proses pembuatan serta perkembangan seni dalam masyarakat.¹⁹

Maka dari itu menurut peneliti kebudayaan memiliki peran penting bagi manusia dan masyarakat. Banyak tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan anggotanya, seperti kekuatan alam dan kekuatan lainnya dalam masyarakat, tidak selalu menguntungkan. Selain itu, manusia dan masyarakat membutuhkan kepuasan, baik secara spiritual maupun material. Sebagian besar kebutuhan masyarakat ini dipenuhi oleh kebudayaan yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Namun, karena kemampuan manusia terbatas, kebudayaan yang merupakan hasil kreasinya juga memiliki keterbatasan dalam memenuhi semua kebutuhan.

¹⁹ Tasmuji, dkk., Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 160-165.

b. Definisi Sosial Budaya Masyarakat

Aspek sosial dan budaya suatu masyarakat termasuk adat istiadat, tradisi, keyakinan, nilai-nilai, dan norma-norma, serta cara orang berinteraksi satu sama lain, lingkungan mereka, dan warisan budayanya. Studi tentang sosial budaya sangat penting untuk memahami dinamika suatu masyarakat dan penduduknya, serta untuk membuat kebijakan dan program yang mendukung kesejahteraan sosial dan budaya.²⁰

Sistem sosial dipahami sebagai *“any, especially a relatively persistent, patterning of social relations across „time-space,” understood as reproduced practices”*. Dalam konsep yang lebih umum, sebuah masyarakat, organisasi sosial, atau kelompok, di mana pun dan kapan pun berada, dapat dianggap sebagai suatu sistem sosial. Dalam sistem ini, terdapat potensi untuk berbagai subsistem sosial yang beroperasi dalam beragam pola sistematis. Dalam pandangan fungsionalisme, sistem sosial adalah kerangka interaksi yang terjadi antara dua atau lebih pelaku, di mana setiap pelaku memiliki peran fungsionalnya sendiri dalam suatu komunitas.²¹

²⁰ Roro Dwi Sulistyowati. Pengembangan Pariwisata Melalui Nilai Budaya Berwawasan Lingkungan Budaya, Paradigma Baru Simbiosis Mutualisme. *Jurnal Terapung : Ilmu – Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 1, Maret 2021. 26-33

²¹ N. H. Kistanto, Sistem Sosial-Budaya di Indonesia. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, vol. 3, no. 2, Oct. 2008. <https://doi.org/10.14710/sabda.3.2.%p>

Perkembangan dan kepemilikan bersama suatu komunitas, yang diwariskan dari generasi ke generasi, membentuk budaya. Komponen yang kompleks dari budaya ini termasuk sistem politik dan agama, tradisi, bahasa, peralatan, pakaian, struktur bangunan, dan karya seni.²² Menurut E.B. Tylor, budaya adalah sebuah kompleks yang terdiri dari pengetahuan, keyakinan, ekspresi seni, etika, ilmu pengetahuan, sistem hukum, tradisi, serta keterampilan yang diperoleh oleh individu sebagai bagian dari masyarakat.²³ Maka dari itu menurut peneliti budaya mampu menjadi sebuah identitas suatu daerah atau kelompok masyarakat.

Sosial budaya, atau kebudayaan, menurut Andreas Eppink, mencakup segala sesuatu atau nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat dan menjadi ciri khas masyarakat tersebut. Burnett, di sisi lain, mengatakan bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang luas yang terdiri dari hal-hal seperti seni, moral, tradisi, hukum, pengetahuan, keyakinan, dan kemampuan berpikir yang dimiliki setiap orang sebagai bagian dari masyarakat. Menurutnya, kebudayaan memiliki banyak kompleksitas.²⁴

²² Armen, *Buku Ajar Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Cet. 1: Yogyakarta; Deepublish, 2015, 23.

²³ Elly M. Setiadi dan Kama Abdul Hakam. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar Cet 3*. Jakarta; Kencana, 2016. 28.

²⁴ Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008. 27.

Menurut Moh. Dulkiah & Sarbini aspek-aspek penting dari perubahan sosial mencakup perubahan dalam hal berikut:

- 1) *Pertama*, Perubahan pola pikir terkait dengan cara orang melihat, memahami, menceritakan, dan menginterpretasikan realitas kehidupan. Semua orang di masyarakat mungkin memiliki perspektif yang berbeda tentang hal-hal tertentu, seperti teknologi modern. Orang-orang tertentu mungkin mendukung atau menentang penggunaan teknologi modern. Ketika anggota masyarakat menyadari manfaat teknologi modern dalam kehidupan mereka, terjadi perubahan sosial. Ini terlihat dalam pertanian, di mana orang beralih dari menggunakan kerbau dan sapi untuk membajak tanah menjadi menggunakan traktor dan doser.
- 2) *Kedua*, perubahan dalam perilaku masyarakat melibatkan perubahan dalam sistem-sistem sosial, di mana masyarakat meninggalkan sistem lama dan mengadopsi sistem baru. Ini dapat mencakup perubahan dalam cara memberikan penghargaan yang lebih baik dan lebih toleran terhadap kelompok lain dalam interaksi sosial.
- 3) *Ketiga*, perubahan dalam budaya masyarakat berhubungan dengan perubahan dalam artefak budaya yang digunakan oleh masyarakat, seperti model pakaian, karya ilmiah, teknologi, dan

lainnya. Perubahan ini terjadi seiring waktu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

c. Faktor-Faktor Sosial Budaya yang Mempengaruhi Pengambilan Kebijakan di Sekolah

Beberapa faktor sosial budaya yang mempengaruhi pengambilan kebijakan di sekolah meliputi:

- 1) Nilai dan Norma Masyarakat: Nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat di sekitar sekolah dapat memengaruhi kebijakan pendidikan. Misalnya, nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, atau tradisi tertentu dapat memengaruhi pemilihan kebijakan tertentu.²⁵
- 2) Partisipasi Masyarakat: Tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dapat dipengaruhi oleh faktor budaya. Beberapa komunitas mungkin lebih aktif dalam pengambilan kebijakan daripada yang lain, tergantung pada budaya partisipasi mereka.²⁶
- 3) Keanekaragaman Budaya: Sekolah sering kali melayani siswa dari berbagai latar belakang budaya. Faktor ini dapat

²⁵ Jusnimar Umar. Peranan Nilai Sosial dalam Pengembangan Pendidikan Umum. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*. Vol 5, No 2 (2015). 1-18.

²⁶ Isma Rosyida & Fredian Tonny Nasdian. Partisipasi Masyarakat Dan Stakeholder Dalam Penyelenggaraan Program Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Dampaknya Terhadap Komunitas Perdesaan. *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia* April 2011. 51-70.

memengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya, serta pengembangan program yang sesuai dengan kebutuhan beragam siswa.

- 4) Nilai Pendidikan: Pandangan masyarakat terhadap tujuan pendidikan dan nilai-nilai yang harus ditanamkan dalam siswa juga berperan dalam pengambilan kebijakan pendidikan. Misalnya, apakah pendidikan lebih menekankan pada pencapaian akademik, karakter, atau nilai-nilai sosial.
- 5) Kepercayaan Agama dan Kepercayaan Tradisional: Kepercayaan agama dan tradisi budaya lokal dapat memengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan kurikulum, praktik agama di sekolah, atau pengakuan hari libur keagamaan.
- 6) Teori Pendidikan: Teori-teori pendidikan yang dianut oleh masyarakat atau pengambil kebijakan sekolah juga dapat memengaruhi bagaimana kebijakan pendidikan dirancang dan dijalankan.
- 7) Faktor Demografis: Karakteristik demografis dari masyarakat sekitar sekolah, seperti tingkat pendidikan orang tua, tingkat pendapatan, dan struktur keluarga, juga dapat mempengaruhi kebijakan pendidikan.

2. Teori Manajemen

Teori manajemen adalah seperangkat prinsip dan konsep yang membantu para manajer untuk memahami dan mengelola organisasi secara efektif. Teori-teori ini telah dikembangkan selama berabad-abad dan didasarkan pada penelitian dan pengalaman nyata.

Berikut adalah beberapa teori manajemen²⁷:

a. Teori Manajemen Klasik

Teori manajemen klasik berfokus pada peningkatan efisiensi dan produktivitas organisasi. Pada awal tahun 1800-an, Robert Owen, seorang manajer beberapa pabrik pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia, menekankan pentingnya faktor manusia dalam produksi.

Owen memperbaiki kondisi kerja dengan mengurangi jam kerja standar, membatasi pekerja anak, membangun perumahan yang lebih baik untuk karyawan, dan mengoperasikan toko perusahaan yang menjual barang dengan harga murah. Ia berpendapat bahwa

meningkatkan kondisi karyawan akan meningkatkan produksi dan keuntungan, dengan investasi terbaik adalah pada karyawan yang dianggapnya sebagai "mesin vital". Owen juga mengembangkan berbagai prosedur kerja untuk meningkatkan produktivitas.

Charles Babbage (1792-1871), seorang profesor matematika dari Inggris, mencurahkan waktunya untuk membuat operasi pabrik lebih efisien. Babbage adalah penganjur awal prinsip pembagian kerja

melalui spesialisasi, dengan setiap pekerja diberi pelatihan keterampilan sesuai dengan operasi pabrik.

Prinsip-prinsip utama teori manajemen klasik meliputi:

- a. Pembagian kerja: Pekerjaan dibagi menjadi tugas-tugas kecil yang mudah dipelajari dan dilakukan.
 - b. Rantai komando: Ada hierarki otoritas yang jelas dalam organisasi.
 - c. Manajemen ilmiah: Penggunaan metode ilmiah untuk meningkatkan efisiensi.
 - d. Prinsip birokrasi: Organisasi harus dijalankan dengan cara yang rasional dan impersonal.
- b. Teori Manajemen Neo-Klasik

Teori manajemen neo-klasik berfokus pada aspek manusia dalam organisasi. Tokoh-tokoh utama dalam teori ini termasuk Elton Mayo, Chester Barnard, dan Douglas McGregor. Aliran hubungan manusiawi atau perilaku manusia (neoklasik) muncul karena ketidakpuasan dengan pendekatan klasik yang tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja. Beberapa ahli mencoba melengkapi teori organisasi klasik dengan pandangan sosiologi dan psikologi. Hugo Munsterberg (1863-1916) dan Mayo (1880-1949) merupakan dua tokoh yang memberikan kontribusi dalam aliran ini.

Prinsip-prinsip utama teori manajemen neo-klasik meliputi:

- a. Pentingnya manusia: Karyawan adalah aset terpenting organisasi.
 - b. Motivasi: Karyawan dimotivasi oleh berbagai faktor, termasuk kebutuhan, keinginan, dan nilai-nilai.
 - c. Kepemimpinan: Pemimpin yang efektif harus dapat menginspirasi dan memotivasi karyawan.
 - d. Komunikasi: Komunikasi yang efektif sangat penting untuk organisasi yang sukses.
- c. Teori Manajemen Modern

Teori manajemen modern berfokus pada lingkungan eksternal organisasi. Tokoh-tokoh utama dalam teori ini termasuk Peter Drucker, Alfred Chandler, dan Michael Porter. Manajemen modern berkembang melalui dua jalur berbeda. Jalur pertama merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi yang dikenal sebagai perilaku organisasi, sedangkan yang lain dibangun atas dasar manajemen ilmiah yang dikenal sebagai aliran kuantitatif. Berdasarkan perkembangan teori manajemen ini, dapat disimpulkan bahwa perbaikan dalam kondisi kerja seperti pengurangan jam kerja standar, pembatasan umur pekerja, dan pengembangan teknik-teknik untuk mencapai efisiensi adalah penting.

Prinsip-prinsip utama teori manajemen modern meliputi:

- a. Penekanan pada lingkungan: Organisasi harus beradaptasi dengan lingkungannya yang terus berubah.
 - b. Perencanaan strategis: Organisasi harus memiliki rencana jangka panjang untuk mencapai tujuannya.
 - c. Pengambilan keputusan: Manajer harus membuat keputusan yang efektif berdasarkan informasi yang tersedia.
 - d. Kontrol manajemen: Manajer harus memantau dan mengendalikan kinerja organisasi.
- d. Teori Manajemen Kontemporer

Teori manajemen kontemporer adalah pendekatan yang luas dan beragam terhadap manajemen yang menggabungkan elemen dari teori-teori sebelumnya. Frederick Winslow Taylor mengembangkan manajemen ilmiah sekitar tahun 1900-an, sehingga ia dijuluki "bapak manajemen ilmiah". Taylor menetapkan prinsip-prinsip dasar penerapan pendekatan ilmiah dalam manajemen dan mengembangkan berbagai teknik untuk mencapai efisiensi.

Pasangan suami istri Frank dan Lillian Gilbreth juga memberikan kontribusi pada manajemen ilmiah, dengan Frank mengembangkan studi gerak dan waktu, dan Lillian fokus pada aspek manusia dalam kerja seperti seleksi, penempatan, dan pelatihan personalia. Lillian menyatakan bahwa tujuan akhir manajemen ilmiah adalah membantu karyawan mencapai potensi penuh mereka sebagai manusia. Henry L. Gantt memperkenalkan konsep kerjasama saling

menguntungkan antara tenaga kerja dan manajemen, seleksi ilmiah tenaga kerja, sistem insentif (bonus) untuk merangsang produktivitas, dan penggunaan instruksi kerja yang terperinci. Harrington Emerson juga menyumbangkan prinsip efisiensi yang terkenal.

Prinsip-prinsip utama teori manajemen kontemporer meliputi:

- a. Pentingnya pemangku kepentingan: Organisasi harus mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingannya, termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat.
- b. Etika: Manajer harus bertindak secara etis dan bertanggung jawab.
- c. Keberagaman: Organisasi harus menghargai dan merangkul keragaman.
- d. Keberlanjutan: Organisasi harus berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

3. Manajemen Pendidikan

Menurut Yamin, manajemen pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu proses kerja sama yang sistematis, komprehensif, dan terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Selain itu, manajemen pendidikan juga dapat didefinisikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai berbagai jenis tujuan,

termasuk tujuan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁸

Menurut E. Mulyasa Manajemen pendidikan merupakan proses pengembangan kegiatan kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Proses pengendalian kegiatan tersebut mencakup perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi dan pengawasan sebagai suatu Proses untuk visi menjadi aksi.²⁹

Sebagaimana dinyatakan oleh Yamin dan E. Mulyasa, manajemen pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu proses kerja sama yang terpadu dan terstruktur untuk mencapai tujuan pendidikan di tingkat nasional. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan adalah semua aspek manajemen pendidikan. Ini adalah seni dan ilmu yang berusaha mengelola sumber daya pendidikan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pertumbuhan moral, spiritual, kepribadian, kecerdasan, dan keterampilan peserta didik. Pada akhirnya, ini akan berdampak positif pada masyarakat, bangsa, dan negara.

a. Fungsi Manajemen Pendidikan

Dalam proses manajemen terlibat fungsi fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer, yaitu: perencanaan (*planning*),

²⁸ Moh. Yamin, *Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan*, Yogyakarta: Diva Press, 2009. 19

²⁹ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004. 7

pengorganisasian (*Organizing*), Pemimpinan (*Leading*) dan pengawasan (*controlling*).³⁰

Adapun pengertian manajemen dari sudut fungsinya adalah proses, kegiatan merencanakan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.³¹ Sejalan dengan pendapat diatas bahwa fungsi-fungsi manajemen yaitu :

1. *Planning* (perencanaan)

Bagi setiap manajemen harus mempunyai planning atau perencanaan yang jelas, karena dengan perencanaan merupakan proses awal dalam menentukan tujuan manajemen yang akan dicapai. Dalam banyak hal perencanaan memegang peran strategis karena fungsi-fungsi manajemen lainnya tidak dapat berjalan tanpa perencanaan.

2. *Organizing* (pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, bahan-bahan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan fasilitas sehingga tercapai suatu organisasi yang dapat digerakan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

³⁰ Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006. 8

³¹ Deden Makbuloh, *Manajemen Mutu Pendidikan Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 40

3. *Actuating* (kegiatan)

Kegiatan adalah tindakan atau aktivitas seluruh komponen manajemen, bekerja menurut tugas masing-masing, alat-alat dan fasilitas dipergunakan menurut fungsi dan kegunaan masingmasing, dan biaya sesuai dengan alokasi biaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan manajemen.

4. *Controlling* (pengawasan)

Pengawasan atau pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen yang menjamin bahwa kegiatan dapat memberikan hasil seperti seperti yang diinginkan. Pengawasan diperlukan agar semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

b. Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan

Pada dasarnya, manajemen pendidikan adalah cara untuk mengelola berbagai bidang pendidikan untuk mencapai tujuan akademik. Manajemen sumber daya mencakup semua sumber daya yang dimiliki organisasi, seperti manusia, uang, material, teknik, mesin, pasar, dan waktu. Sedangkan manajemen pendidikan mencakup semua kegiatan yang membantu siswa mencapai tujuan pendidikan. Manajemen sekolah mencakup semua hal berikut: siswa, pendidik dan tenaga kependidikan, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, dan layanan pendidikan khusus.³²

³² Ara Hidayat dan Imam Maci, *Pengelolaan Pendidikan*, Yogyakarta: Kaukaba, 2012, 13

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2005 tentang ruang lingkup manajemen pendidikan yang di laksanakan oleh kepala sekolah di sekolah atau madrasah meliputi:

- 1) Rencana program sekolah
- 2) Pelaksanaan program sekolah
- 3) Kepemimpinan
- 4) Pengawasan / evaluasi
- 5) Sistem informasi manajemen³³

c. Prinsip-prinsip Manajemen Pendidikan

Menurut Dauglas dalam kutipan Mustari merumuskan beberapa prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut :

- 1) Memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja.
- 2) Mengkoordinasikan dan mendelegasikan wewenang serta tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan anggota
- 3) Mengenal dengan baik faktor psikologis manusia.
- 4) Relativitas nilai-nilai.³⁴

4. Kebijakan Pendidikan di Sekolah

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.³⁵ Kebijakan dan pengambilan

³³ Mohammad Mustari, *Manajemen Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014. 12

³⁴ Mohammad Mustari, *Manajemen Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014. 11

³⁵ Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta, 2010. 7.

keputusan saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Pengambilan keputusan lebih pragmatis, sedangkan kebijakan lebih teoretis. Kebijakan tanpa pengambilan keputusan sulit akan muncul, sedangkan tindakan pengambilan keputusan yang tidak didasarkan pada teori dapat mengurangi nilai keilmiahannya keputusan. Setiap orang perlu membuat keputusan, terutama mereka yang bekerja sebagai manajer atau pimpinan. Banyak jenis kebijakan dan keputusan menunjukkan kualitas pemimpin. Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk melihat dan mengubah situasi dan keadaan saat ini.³⁶

Raymond Mcleod berpendapat bahwa pengambilan keputusan adalah aktivitas memecahkan permasalahan dengan cara memutuskan sebuah solusi.³⁷ Menurut Shull, pengambilan keputusan adalah suatu proses kesadaran manusia tentang fenomena sosial atau individual berdasarkan peristiwa yang nyata dan nilai pemikiran, yang mencakup aktivitas memilih satu atau lebih alternatif sebagai pemecahan dari masalah yang sedang terjadi. Sementara Sondang P. Siagian mendefinisikan pengambilan keputusan sebagai suatu pendekatan sistematis terhadap sifat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan berdasarkan pertimbangan yang diberikan.³⁸

³⁶ Ahmad Sabri, —Kebijakan dan Pengambilan Keputusan dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Al-Ta'lim*, Jilid 1, Nomor 5, Juli 2013. 373.

³⁷ R. Mcleod, & George P. Schell, *Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta: Salemba Empat, 2012. 20.

³⁸ Eti Rochaery, dkk., *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006. 151-152.

Selain itu, Suharnan menyatakan bahwa pengambilan keputusan adalah proses menentukan berbagai macam kemungkinan tentang situasi yang meminta seseorang untuk membuat prediksi masa depan, memilih antara dua atau lebih pilihan, dan memperkirakan frekuensi perkiraan yang akan terjadi.³⁹ Wang dan Ruhe berpendapat bahwa pengambilan keputusan adalah proses memilih pilihan atau suatu tindakan yang disukai dari beberapa alternatif berdasarkan kriteria atau strategi yang diberikan.⁴⁰

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengambilan keputusan adalah proses memilih alternatif terbaik untuk menyelesaikan masalah sehingga tujuan dapat dicapai. Keputusan penting untuk kepemimpinan, komunikasi, koordinasi, memotivasi, dan perubahan organisasi. Untuk mencapai tujuan pendidikan, kepala sekolah harus dapat mengambil keputusan dengan cepat, efektif, dan efisien.

Strategi pengambilan keputusan sekolah adalah proses membuat rencana dengan kepala sekolah dan anggota yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolah. Ini adalah proses yang menentukan alternatif terbaik untuk menyelesaikan masalah. Pengambilan keputusan sangat penting untuk sebuah sekolah karena sangat penting

³⁹ Nurmadhani F. Suyuthi, dkk., *Dasar-Dasar Manajemen: Teori, Tujuan, dan Fungsi*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020. 40.

⁴⁰ Rheza Pratama, *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020. 86

untuk kepemimpinan, koordinasi, komunikasi, memotivasi, dan mengubah organisasi atau lembaga.⁴¹

a. Definisi Kebijakan Pendidikan

Secara bahasa, kebijakan adalah terjemahan dari kata "*policy*" dalam bahasa Inggris, yang berarti mengurus kepentingan publik atau administrasi pemerintah. Kebijakan juga terdapat dalam berbagai bahasa lain, seperti Latin, Yunani, dan Sanskerta. Dalam bahasa Latin, kebijakan disebut "*politeia*," yang berarti pemerintahan dengan cara yang ditetapkan, dibuat, dan dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam bahasa Yunani, kebijakan disebut "*polis*," yang berarti negara kota. Sementara itu, dalam bahasa Sanskerta, kebijakan disebut "*pur*," yang berarti kota.⁴²

Menurut Maskuri, kebijakan adalah prinsip atau cara yang dipilih dan digunakan dalam mengarahkan pengambilan keputusan.⁴³

Pendapat ini sejalan dengan Koontz dan O'Donnell yang menyatakan bahwa kebijakan adalah pernyataan atau pemahaman umum yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan, dengan batas-batas tertentu.⁴⁴ Dari dua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa

⁴¹ Husaini Usman, *Manajemen Teori Praktik & Riset Pendidikan*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2008). 361

⁴² Ahmad Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi Ke Implementasi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 31.

⁴³ Arwildayanto, dkk., *Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoretis, Eksploratif dan Aplikatif* (Bandung: CV Cendekia Press, 2018), 4.

⁴⁴ Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2008), 97.

kebijakan adalah serangkaian prinsip atau dasar yang ditetapkan sebagai pedoman pemikiran dalam proses pengambilan keputusan.

Kebijakan yang terkait dalam konteks ini adalah kebijakankebijakan terkait pendidikan. Pendidikan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan wawasan, kesadaran dan ilmu pengetahuan pada masyarakat. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan memiliki arti cara atau strategi yang dapat menjadi pedoman dalam menunjang pencapaian suatu tujuan dengan berupaya memperhatikan dan memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat terkait tujuan tersebut.

b. Karakteristik Kebijakan Pendidikan

Menurut Yoyon Bahtiar Irianto, karakteristik etika kebijakan dalam konteks manajemen pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Empiris: Kebijakan pendidikan didapat dari penemuan empiris melalui prosedur dan teknik ilmiah.
- 2) Relatif: Kriteria, alat, atau prosedur untuk menganalisis kebijakan pendidikan bersifat relatif sesuai dengan jalur, model, dan jenjang.
- 3) Bernilai: Implementasi kebijakan pendidikan harus menghasilkan produk atau dampak yang bernilai bagi masyarakat.

- 4) Keaktifan: Nilai baik dalam implementasi kebijakan pendidikan terletak pada keaktifan atau ketekunan dalam proses implementasi.
- 5) Keyakinan: Sikap yang baik adalah meyakini bahwa implementasi kebijakan pendidikan akan memiliki nilai baik atau buruk, tergantung pada perencanaan yang telah, sedang, dan akan dilakukan.⁴⁵

Karakteristik kebijakan pendidikan meliputi:

- 1) Tujuan Pendidikan: Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.
- 2) Aspek Legal-Formal: Kebijakan pendidikan harus memenuhi persyaratan konstitusional sesuai dengan aturan yang berlaku di setiap daerah atau wilayah tempat kebijakan tersebut dikeluarkan.
- 3) Konsep Operasional:
 - a) Otoritas: Kebijakan dibuat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang dan ahli di bidang pendidikan.
 - b) Evaluasi: Kebijakan pendidikan harus dievaluasi untuk menindaklanjuti hasilnya. Jika hasil evaluasi baik,

⁴⁵ Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan: Konsep, Teori dan Model* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 49.

kebijakan dipertahankan dan dikembangkan; jika terdapat kesalahan, kebijakan diperbaiki atau diganti.

- c) Sistematis: Kebijakan pendidikan harus memiliki sistem yang jelas dengan nilai efektivitas dan efisiensi yang tinggi.⁴⁶

Maka dari itu peneliti beranggapan bahwa sebuah kebijakan pendidikan yang efektif seharusnya didasarkan pada karakteristik yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diuraikan. Pertama, kebijakan tersebut haruslah empiris, artinya berdasarkan pada penemuan ilmiah dan data yang valid untuk mendukung keputusan yang diambil. Kedua, kebijakan tersebut harus relatif, dengan mempertimbangkan berbagai konteks dan kebutuhan yang berbeda di berbagai jalur, model, dan jenjang pendidikan. Ketiga, implementasi kebijakan pendidikan harus menghasilkan dampak positif dan bernilai bagi masyarakat, menciptakan perubahan yang nyata dalam sistem pendidikan. Keempat, kebijakan tersebut perlu diimplementasikan dengan tingkat keaktifan dan ketekunan yang tinggi, melibatkan berbagai pihak terkait secara aktif. Kelima, keyakinan dalam keberhasilan kebijakan pendidikan harus didukung oleh perencanaan yang matang dan evaluasi yang berkala untuk memastikan efektivitasnya. Dalam aspek legal-formal, kebijakan harus mematuhi

⁴⁶ Ahmad Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi Ke Implementasi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 38.

ketentuan konstitusional dan hukum yang berlaku. Selain itu, konsep operasional kebijakan pendidikan harus jelas, dengan prosedur yang ditetapkan secara tepat oleh pihak yang berwenang, dievaluasi secara sistematis, dan memiliki sistem yang terstruktur untuk mencapai tujuan-tujuannya dengan efektivitas dan efisiensi yang tinggi.

c. Langkah-Langkah Pembuatan Kebijakan Pendidikan

Perumusan masalah dalam konteks kebijakan serupa dengan definisi masalah yang dihasilkan dari pemahaman mendalam terhadap kondisi atau keadaan yang ada, yang dapat mengidentifikasi isu-isu kritis dalam kebijakan. Dalam bidang pendidikan, ini melibatkan pengenalan terhadap persoalan publik yang memerlukan perhatian pemerintah, serta mencari berbagai alternatif solusi yang dapat menjadi fokus perhatian publik. Perumusan masalah kebijakan pendidikan mengarah pada pengajuan rencana tindakan yang optimal untuk mencapai kesepakatan, kompromi, serta pengaturan aturan atau pedoman yang didukung dengan sanksi yang diterima secara umum. Hal ini bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat.⁴⁷

Menurut William N. Dunn beberapa tahapan dalam perumusan kebijakan diantaranya sebagai berikut:

⁴⁷ Arwidayanto, dkk., Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoretis, Eksploratif dan Aplikatif (Bandung: CV Cendekia Press, 2018), 55-56.

1) Merumuskan Masalah Kebijakan

Perumusan kebijakan pendidikan sering kali tidak selalu menghasilkan peraturan atau undang-undang baru. Anderson menekankan bahwa fokus utama dari perumusan kebijakan adalah untuk menciptakan perubahan mendasar terhadap kebijakan yang sudah ada saat ini. Ini berarti bahwa tujuan utamanya adalah untuk menyempurnakan atau mengubah kebijakan yang sudah ada agar lebih sesuai dengan kondisi atau masalah yang dihadapi, bukan selalu menciptakan sesuatu yang baru secara hukum.⁴⁸

Perumusan masalah melibatkan serangkaian kegiatan yang berhubungan erat, seperti mencari masalah, mengidentifikasi masalah, mengklarifikasi, dan mengenali masalah. Pada tahap ini, tujuannya adalah untuk menetapkan definisi masalah atau situasi yang terkait dengan implementasi kebijakan yang sedang berlangsung.⁴⁹

Perumusan masalah dapat dipandang sebagai proses yang terdiri dari beberapa tahapan yang saling terkait. Menurut William N. Dunn, terdapat empat fase utama dalam perumusan masalah, di mana setiap fase bergantung pada fase sebelumnya:

- a) Tahap Pencarian Masalah (problem search): Pada tahap ini, para perumus kebijakan menentukan prioritas masalah yang

⁴⁸ Ibid. 57

⁴⁹ Ibid. 58

akan diselesaikan. Mereka melakukan identifikasi masalah yang perlu mendapatkan perhatian utama.

- b) Tahap Pendefinisian Masalah (problem definition): Setelah masalah-masalah teridentifikasi, tahap ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap hakikat masalah yang akan diselesaikan. Para perumus mencari tahu sebab-sebab dan akibat-akibat dari masalah tersebut.
- c) Tahap Spesifikasi Masalah (problem specification): Pada tahap ini, perumus kebijakan menentukan secara spesifik jenis masalah yang akan diselesaikan, misalnya masalah ekonomi, sosial, hukum, atau aspek-aspek lain yang relevan dalam konteks yang dibahas, seperti dalam pendidikan.
- d) Tahap Pengenalan Masalah (problem sensing): Tahap terakhir ini melibatkan pengenalan secara mendalam terhadap masalah yang sedang dihadapi atau tengah terjadi.

Hal ini membantu perumus kebijakan untuk memahami dengan lebih baik konteks dan urgensi dari masalah yang perlu diatasi.⁵⁰

Dengan demikian, melalui tahapan-tahapan ini, perumusan masalah membantu mengarahkan langkah-langkah kebijakan yang lebih tepat dan efektif dalam menanggapi tantangan yang ada.

⁵⁰ William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), 226-246

2) Menentukan Prediksi Kebijakan Masa Depan

Langkah berikutnya adalah bagi perumus kebijakan untuk menyediakan informasi mengenai konsekuensi atau dampak yang akan terjadi di masa depan dari penerapan alternatif yang telah ditentukan. Informasi ini didasarkan pada data yang ada atau yang sudah terjadi sebelumnya. Tujuan dari peramalan ini adalah untuk memberikan wawasan tentang perubahan kebijakan di masa depan. Perumus kebijakan berupaya merencanakan dan menetapkan kebijakan untuk masa depan, sehingga dapat menentukan tindakan terbaik di antara berbagai kemungkinan yang ada. Selain itu, peramalan ini memungkinkan adanya kontrol lebih besar dengan menggunakan kebijakan masa lalu dan konsekuensinya sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan di masa depan. Dengan demikian, perumus kebijakan dapat secara aktif membentuk masa depan, terlepas dari apa yang terjadi di masa lalu.⁵¹

Prediksi atau peramalan adalah tahapan dalam menghasilkan informasi faktual tentang kondisi sosial di masa depan berdasarkan informasi yang ada terkait masalah kebijakan. Terdapat tiga model peramalan, yaitu:

- a) Proyeksi: Merupakan gambaran yang didasarkan pada pengamatan kecenderungan di masa lalu dan masa depan.

⁵¹ Ibid. 293

- b) **Prediksi:** Merupakan rancangan yang didasarkan pada landasan teoretis. Model ini penting karena memberikan spesifikasi berdasarkan sebab dan akibat (konsekuensi) atau berdasarkan proses atau hubungan yang paralel (analog) yang diyakini mendasari suatu hubungan.
- c) **Perkiraan:** Adalah ramalan yang didasarkan pada penilaian informatif atau penilaian ahli tentang kondisi di masa depan. Model ini bisa berupa peramalan yang diungkapkan berdasarkan intuisi, yang diasumsikan melibatkan kekuatan batin dan kreativitas atau pengetahuan terpendam dari para pembuat kebijakan. Selain itu, model ini juga bisa disampaikan dengan argumen yang bersifat memotivasi, sehingga tujuan, nilai, dan keinginan saat ini atau di masa depan dapat digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan kemungkinan pernyataan atau ramalan.⁵²

3) Menentukan Rekomendasi Kebijakan

Pada tahap ini, perumus kebijakan dapat menentukan rekomendasi atau alternatif kebijakan terbaik dengan disertai alasan pilihannya. Oleh karena itu, kebijakan berhubungan dengan masalah etika dan moral. Dalam hal ini, terdapat enam kriteria untuk merekomendasikan kebijakan:

⁵² Ibid. 191-192

- a) Efektivitas: Berkenaan dengan pencapaian tujuan pelaksanaan kebijakan, yaitu hasil (akibat) yang sesuai dengan harapan.
- b) Efisiensi: Berkaitan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk mencapai efektivitas tertentu dari kebijakan yang diterapkan.
- c) Kecukupan: Terkait dengan sejauh mana tingkat efektivitas dapat memuaskan kebutuhan, nilai, atau tuntutan yang menimbulkan suatu masalah.
- d) Kesetaraan: Berkaitan dengan rasionalitas legal dan sosial, yang mengacu pada distribusi akibat dan usaha di antara kelompok-kelompok berbeda dalam masyarakat atau yang memiliki hubungan dengan konsepsi yang bersaing.
- e) Responsivitas: Kriteria yang berhubungan dengan sejauh mana suatu kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat tertentu.
- f) Ketepatan: Berkaitan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang kelayakan kebijakan tidak hanya berhubungan dengan satu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersamaan. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kekuatan asumsi yang mendasari tujuan-tujuan tersebut.⁵³

⁵³ Ibid. 429-440

Metode dalam merekomendasikan kebijakan meliputi:

- a) Pemetaan Sasaran: Teknik untuk menyusun tujuan, sasaran, dan alternatif yang telah diidentifikasi menggunakan satu atau dua metode perumusan kebijakan.
- b) Klarifikasi Nilai: Prosedur untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan premis nilai berdasarkan seleksi terhadap sasaran kebijakan.
- c) Kritik Nilai: Serangkaian prosedur untuk menguji argumen-argumen yang saling bertentangan dalam debat mengenai tujuan kebijakan.
- d) Perumusan Elemen Biaya: Prosedur untuk mengklasifikasikan dan mendeskripsikan semua biaya yang akan dikeluarkan dalam penetapan dan pelaksanaan suatu program.
- e) Estimasi Biaya: Prosedur untuk menyediakan informasi tentang nilai uang dari setiap komponen dalam struktur elemen biaya.
- f) Harga Bayangan: Prosedur untuk membuat keputusan subjektif mengenai nilai uang dari manfaat dan biaya ketika harga pasar tidak dapat dipercaya atau tidak tersedia.
- g) Pemetaan Hambatan: Prosedur untuk mengidentifikasi keterbatasan atau hambatan yang dapat menghalangi pencapaian sasaran kebijakan dan program.

- h) Internalisasi Biaya: Prosedur untuk memasukkan semua biaya eksternal yang relevan (eksternalitas) ke dalam struktur elemen biaya internal.
 - i) Diskonting: Prosedur untuk memperkirakan nilai saat ini dari biaya dan manfaat yang akan diperoleh di masa depan, dengan mempertimbangkan dampak waktu dalam membuat rekomendasi kebijakan.
 - j) Analisis Sensitivitas: Prosedur untuk mengetahui sensitivitas hasil dari analisis biaya-manfaat atau biaya-efektivitas terhadap beberapa asumsi alternatif tentang kemungkinan tingkat biaya atau manfaat tertentu.
 - k) Analisis Plausibilitas: Prosedur untuk menguji rekomendasi dengan menghadapi pernyataan yang berlawanan.⁵⁴
- 4) Mendeskripsikan dan Memantau Penerapan Kebijakan

Menurut Van Meter yang dikutip oleh Arif Rohman, implementasi kebijakan adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang atau pimpinan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁵⁵ Sedangkan M. Grindle menyatakan bahwa proses implementasi melibatkan beberapa tugas yang saling berkaitan, yang memungkinkan arah suatu kebijakan terwujud sebagai hasil dari tindakan pemerintah.⁵⁶

⁵⁴ Ibid. 464-493

⁵⁵ Arwildayanto, dkk., Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoretis., 132.

⁵⁶ Ibid. 133

Solichin Mujiyanto menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah proses panjang yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah, serta melibatkan bagaimana para pelaku kebijakan menjalankan ketetapan baru yang telah diberlakukan. Riant Nugroho mendukung pandangan ini dengan menambahkan bahwa implementasi kebijakan adalah cara untuk memastikan kebijakan organisasi terlaksana dan mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, baik melalui pelaksanaan langsung program kegiatan maupun melalui aturan pelaksanaan yang memudahkan penerapan program tersebut.⁵⁷

Menurut peneliti, secara umum, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses kompleks dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai tindakan, tugas, dan pelaksanaan oleh pihak berwenang untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran kebijakan dapat tercapai dengan efektif. Proses ini tidak hanya berfokus pada pelaksanaan teknis tetapi juga melibatkan penyesuaian dan penerapan ketetapan baru untuk mengatasi masalah dan memenuhi tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pada tahap mendeskripsikan penerapan kebijakan pendidikan, ini merupakan proses analisis kebijakan yang bertujuan untuk menghasilkan informasi tentang berbagai

⁵⁷ Ibid. 78

rangkaian tindakan dalam penyelesaian masalah yang memiliki dampak luas bagi masyarakat secara keseluruhan. Pada tahap ini, perumus kebijakan memberikan informasi tentang penyebab dan akibat dari kebijakan yang telah dilaksanakan berdasarkan pemantauan yang telah dilakukan.

Berikut adalah pendekatan yang dapat digunakan oleh perumus kebijakan:

- a) Akuntansi Sistem Sosial: Pendekatan ini memungkinkan perumus kebijakan untuk memantau perubahan kondisi sosial secara objektif dan subjektif dari waktu ke waktu.
- b) Eksperimentasi Sosial: Proses ini melibatkan manipulasi tindakan kebijakan secara sistematis untuk mendapatkan jawaban yang tepat terhadap permasalahan sumber daya yang dapat memengaruhi hasil kebijakan.
- c) Pemeriksaan Sosial: Pendekatan ini secara eksplisit melibatkan pemantauan hubungan antara input, proses, output, dan dampak kebijakan untuk menentukan apakah hasil kebijakan merupakan konsekuensi dari kecukupan input atau akibat dari proses yang mengalihkan sumber daya atau pelayanan dari kelompok sasaran yang diinginkan.
- d) Sintesis Riset dan Praktik: Pendekatan ini menggunakan kompilasi, perbandingan, dan pengujian sistematis terhadap hasil-hasil penerapan kebijakan publik di masa lalu.

Pendekatan ini menggabungkan studi kasus formulasi dan implementasi kebijakan serta laporan-laporan penelitian yang mengkaji hubungan antara tindakan atau implementasi dengan hasil kebijakan.

Pendekatan-pendekatan ini membantu perumus kebijakan dalam memahami dan mengevaluasi efektivitas serta dampak dari kebijakan pendidikan yang diterapkan.⁵⁸

5) Mengevaluasi kinerja kebijakan

Suchman mengartikan evaluasi sebagai proses penilaian terhadap hasil yang telah dicapai dari tindakan atau program yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan tertentu.⁵⁹

Menurut Worthen dan Sanders, evaluasi adalah upaya untuk menemukan nilai atau manfaat dari suatu tindakan atau program.⁶⁰

Evaluasi kinerja kebijakan dilakukan dengan tujuan memberikan informasi yang akurat mengenai bagaimana kebijakan tersebut

berkinerja serta memberikan justifikasi tambahan dan konfirmasi terhadap nilai-nilai dasar yang mendasari pemilihan tujuan dan target kebijakan.⁶¹

Berikut adalah beberapa pendekatan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja kebijakan:

⁵⁸ William N. Dunn, Pengantar Analisis., 523-546.

⁵⁹

⁶⁰ Arwildayanto, dkk., Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoretis., 174.

⁶¹ Rusdiana, Kebijakan Pendidikan., 72.

- a) Evaluasi Semu (Pseudo Evaluation): Pendekatan ini menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil penerapan kebijakan, tanpa mempertanyakan manfaat atau nilai dari hasil tersebut kepada individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Inti dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran manfaat atau nilai dianggap sudah jelas atau tidak menimbulkan kontroversi.
- b) Evaluasi Formal (Formal Evaluation): Pendekatan ini juga menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya terkait hasil penerapan kebijakan yang telah dipublikasikan secara formal oleh perumus kebijakan dan administrator atau pelaksana program. Inti dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target kebijakan diumumkan secara formal dan menjadi ukuran yang tepat untuk menilai pencapaian manfaat atau nilai dari penerapan kebijakan.
- c) Evaluasi Keputusan Teoretis (Theoretical Decision Evaluation): Pendekatan ini menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil penerapan kebijakan yang dinilai secara eksplisit oleh berbagai pelaku kebijakan. Inti dari evaluasi keputusan teoretis adalah

pendekatan ini berusaha mengungkap dan menjelaskan tujuan serta target dari para pelaku kebijakan, baik yang tersembunyi maupun yang dipublikasikan. Tujuan dan target dari perumus dan administrator kebijakan dianggap sebagai sumber nilai, karena semua pihak yang terlibat dalam formulasi dan penerapan kebijakan turut serta dalam merumuskan tujuan dan target yang akan dievaluasi kinerjanya. Salah satu tujuan utama pendekatan ini adalah menghubungkan informasi terkait hasil penerapan kebijakan dengan nilai-nilai dari berbagai pelaku kebijakan.⁶²

Dari seluruh uraian langkah-langkah dalam pembuatan kebijakan peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan pendidikan yang efektif harus didasarkan pada prinsip-prinsip empiris, relatif, bernilai, keaktifan, dan keyakinan. Proses perumusan kebijakan melibatkan identifikasi masalah, prediksi dampak masa depan, pemilihan alternatif kebijakan terbaik, implementasi yang aktif, dan evaluasi berkala. Tujuan akhir dari kebijakan pendidikan adalah menciptakan dampak positif dan bernilai bagi masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut memenuhi kebutuhan dan tuntutan pendidikan yang terus berkembang.

⁶² William N. Dunn, Pengantar Analisis., 613-623

a. Dasar-Dasar Pengambilan

Keputusan Dasar-dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan ada berbagai macam, dilihat dari jenis dan tingkat permasalahan yang terjadi. Menurut George R. Terry,⁶³ akan peneliti jelaskan sebagai berikut :

1) Intuisi

Keputusan yang dibuat berdasarkan intuisi atau perasaan adalah subjektif dan mudah terpengaruh. Kelebihan dan kekurangan pengambilan keputusan dengan intuisi adalah sebagai berikut: itu membutuhkan waktu yang singkat; itu cocok untuk masalah yang bersifat manusiawi atau tidak memiliki banyak pengaruh; dan itu dilakukan oleh satu pihak, sehingga mudah untuk memutuskan. Kelemahan: Akibat dari keputusan yang buruk; sulit untuk menemukan perbandingan untuk mengevaluasinya; dan seringkali mengabaikan faktor lain karena satu pihak membuat keputusan.

2) Pengalaman

Pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan sesuatu menjadi keuntungan tersendiri, seperti kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat dan mudah menemukan

⁶³ Moh. Yunus dan A. Risma Jaya, *Metode dan Model Pengambilan Keputusan (The Way to Success)*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2020). 54-57.

solusinya, menjadikan pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah.

3) Fakta

Pengambilan keputusan berdasarkan fakta cukup memerikan keputusan yang sehat, baik, dan solid. Adanya fakta dapat memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi dalam pengambilan keputusan, sehingga orang lain harus dengan rela dan lapang dada dalam menerima keputusan yang dibuat.

4) Wewenang

Berdasarkan wewenang, pengambilan keputusan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki posisi yang tinggi dalam organisasi atau lembaga. Sifat rutin dari pengambilan keputusan ini sering menyebabkan masalah yang harus diselesaikan menjadi tidak jelas.

5) Rasional

Ada hubungan antara daya guna dan keputusan rasional. Keputusan rasional juga lebih objektif, logis, jelas, dan konsisten dalam upaya memaksimalkan hasil dalam batas tertentu, yang memungkinkan mereka mendekati kebenaran sesuai dengan tujuan mereka. Keputusan yang rasional dalam masyarakat dapat diukur dengan seberapa maksimal kepuasan masyarakat dapat dicapai dalam batas-batas nilai yang jelas.

Jadi dapat di simpulkan bahwa terdapat beberapa dasar dalam pengambilan keputusan diantaranya yaitu intuisi, pengalaman, fakta, wewenang dan rasional.

b. Strategi Pengambilan Keputusan Kebijakan di Sekolah

Menurut Mondy dan Premeux langkah-langkah pengambilan keputusan terdiri dari lima (5) langkah, yaitu :

- 1) Mengidentifikasi masalah atau peluang;
- 2) Membuat berbagai alternatif;
- 3) Menilai semua alternatif tersebut;
- 4) Mempunyai dan melaksanakan alternatif; serta
- 5) Mengevaluasi alternatif.⁶⁴

Adapun menurut Herbert A. Simon, langkah-langkah pengambilan keputusan yang digunakan dalam lembaga pendidikan yaitu, sebagai berikut :

- 1) Intelegensi
- 2) Rancangan
- 3) Pilihan
- 4) Implementasi.⁶⁵

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pertimbangan matang sangat penting untuk pengambilan keputusan agar situasi tidak

⁶⁴ Syafaruddin & Anzhizan, *Sistem Pengambilan Keputusan Pendidikan*, (Jakarta: Grasindo, 2008). 55-56.

⁶⁵ Eti Rochaery, dkk., *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). 165.

menjadi lebih buruk. Dalam proses pengambilan keputusan, berbagai pendekatan digunakan, seperti yang disebutkan oleh Mondy dan Premeux, termasuk mengidentifikasi masalah, membuat alternatif, dan mengevaluasi alternatif, antara lain. Selain itu, Siagian P. Sondang membahas tujuh langkah pengambilan keputusan, yaitu mendefinisikan masalah dengan benar, mengumpulkan data yang relevan, membuat keputusan tentang cara pemecahannya, dan mengevaluasi hasilnya. Herbert A. Simon juga memberikan perspektif tentang proses pengambilan keputusan di lembaga pendidikan yang mencakup proses intelegensi, rancangan, pilihan, dan implementasi. Semua pendekatan ini menunjukkan betapa sulit dan pentingnya proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan sekolah.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan pendidikan di sekolah.

Dalam proses pengambilan keputusan tentunya suatu lembaga pendidikan atau organisasi tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Dermawan, faktor pengambilan keputusan dibagi menjadi tiga bagian waktu, diantaranya yaitu :

- 1) Masa Lalu
 - a) Permasalahan dan tantangan yang belum terselesaikan;
 - b) Peristiwa-peristiwa dan pengalaman yang pernah dialami;

- c) Keinginan dimasa lalu yang belum terwujud;
- d) Adanya informasi di masa lalu.

2) Masa Kini

- a) Berubahnya faktor lingkungan;
- b) Visi, misi, dan tujuan yang hendak dicapai;
- c) Kualitas dan kesesuaian informasi yang ada;
- d) Pengetahuan yang muncul dari pemrosesan informasi;
- e) Terjadinya kelangkaan dan keterbatasan;
- f) Hasil dan faktor lingkungan yang telah berubah;
- g) Berbagai keputusan yang diambil oleh manajer dari organisasi lain;
- h) Adanya tindakan dalam melakukan pemilihan alternatif solusi.

3) Masa Depan

- a) Visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai;
- b) Peluang timbulnya risiko dan kelangkaan;
- c) Tersedianya informasi yang diinginkan;
- d) Lingkungan yang berpotensi untuk berubah.⁶⁶

Adapun pendapat dari Eti Rochaety yang menyatakan ada lima (5) kekuatan yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan, yaitu sebagai berikut :

1) Posisi atau Kedudukan

⁶⁶ Rizky Dermawan, *Pengambilan Keputusan: Landasan Filosofi, Konsep, dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2004). 29.

- 2) Masalah
- 3) Situasi
- 4) Kondisi
- 5) Tujuan⁶⁷

5. Implikasi Sosial Budaya Masyarakat terhadap Pengambilan Kebijakan di Sekolah

Dalam penelitian Subiyantoro (2013) menunjukkan bahwa dua aspek utama, yaitu budaya material (artifak) dan budaya perilaku (aktivitas kultur). Kedua aspek tersebut melibatkan fenomena budaya disiplin, kebersihan, serta hubungan antarwarga sekolah, baik dalam kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Penelitian ini juga mencakup kegiatan rutin sekolah yang diatur secara khusus, seperti shalat malam, yang dapat membentuk tanggung jawab berdasarkan norma-norma, kejujuran, dan keberagamaan siswa secara komprehensif. Fokus pada aspek keberagamaan diarahkan pada pelaksanaan shalat wajib siswa, mengingat ritual shalat lima waktu mencakup lima dimensi keberagamaan: iman, ilmu, ritual, penghayatan, dan dampak keagamaan. Pada dimensi dampak keagamaan, terdapat nilai-nilai kehidupan yang dikaitkan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pengukuran aktualisasi nilai humanis-

⁶⁷ Eti Rochaery, dkk., *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). 154-155.

religius siswa dilakukan untuk menilai efektivitas model pendidikan nilai yang diujicobakan.⁶⁸

a. Nilai-nilai dan Tradisi Lokal:

Karena masyarakat memiliki nilai-nilai, keyakinan, dan tradisi lokal yang dapat memengaruhi kebijakan pendidikan di sekolah, kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan nilai-nilai ini agar sesuai dengan budaya masyarakat dan mendapatkan dukungan.⁶⁹ Pendidikan karakter yang didasarkan pada kearifan lokal juga dapat menjadi cara untuk memperkuat nilai lokal dalam pendidikan. Setiap masyarakat harus mendukung pelaksanaan kebijakan publik untuk menjaga moral dan nilai agar masyarakat lebih terlibat dalam gagasan pemerintahan yang baik.⁷⁰ Selain itu, pendidikan berbasis budaya lokal juga dapat membantu mempertahankan tradisi dan keyakinan nenek moyang serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan.⁷¹

b. Bahasa dan Komunikasi:

Bahasa adalah bagian penting dari budaya. Untuk membuat kebijakan pendidikan, bahasa yang digunakan dalam pengajaran dan

⁶⁸ Subiyantoro. Pengembangan model pendidikan nilai humanis-religius berbasis kultur madrasah. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 4(3) (2013). 329

⁶⁹ Neprializa. Manajemen Budaya Sekolah. *Jurnal Manajer Pendidikan*, Volume 9, Nomor 3, Juli 2015, 419-429.

⁷⁰ M Ganarditya. Pengaruh Kearifan Lokal Terhadap Pelayanan Publik (Studi Kasus Penyelewengan Dana Bansos). *CENDEKIA Jaya*, 3(2), (2021). 10-19. <https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v3i2.185>

⁷¹ Herawati Sandiningtyas, Bambang Budi Wiyono. Pendidikan Berbasis Budaya Lokal Suku Boti: Studi Kasus di SDN-SMPN Satu Atap Oefau Desa Boti Nusa Tenggara Timur. *Ilmu Pendidikan: Jurnal Kajian Teori dan Praktik Kependidikan* Volume 3, Nomor 1, Juni 2018. 77-82.

komunikasi dengan orangtua dan masyarakat harus mempertimbangkan bahasa yang dominan di wilayah tersebut.⁷²

c. Partisipasi Masyarakat:

Masyarakat memiliki peran penting dalam pengambilan kebijakan pendidikan; kebijakan yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan pendidikan seringkali lebih berhasil dan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.⁷³ Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti melalui komite madrasah, diskusi formal dan informal, serta memberikan bantuan berupa dana sukarela dan sumbangan material. Partisipasi masyarakat juga dapat membantu dalam mengawasi belajar anak di rumah dan perilaku anak di lingkungan masyarakat.⁷⁴ Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat membantu dalam menggodok dan merumuskan segala macam keputusan yang berkaitan dengan pendidikan serta ikut serta dalam implementasi konsep yang telah dibuat.⁷⁵ Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pendidikan adalah pencapaian tujuan

⁷² Sumarnie. Pengaruh Penggunaan Bahasa di Rumah dan Pendidikan Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Matematika Murid Kelas I SD Negeri Kecamatan Selat Kuala Kapuas. *Jurnal Pendidikan*, 20(2), (2019). 112–123. <https://doi.org/10.52850/jpn.v20i2.884>

⁷³ Erma Fatmawati. Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Peran Birokrasi Dan Partisipasi Masyarakat. *JIEMAN: Journal of Islamic Educational Management* Vol. 1, No. 1, Desember 2019. 58-76.

⁷⁴ Samsiah, S., Ibrahim, M., & Musdalifah, M. Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Maroanging Kabupaten Bulukumba. *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2) (2018)., 171-181. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/elidare.v4i2.3646>

⁷⁵ I Putu Widyanto. Partisipasi masyarakat dalam perkembangan pendidikan melalui manajemen berbasis sekolah (MBS). *Jurnal Satya Sastraharing* Vol 03 No. 02 Tahun 2019. 93-112.

dan mutu pendidikan dilihat dari indeks kualitas dan kompetensi riil, bukan sekedar formalitas statistik dan narasi tertulis dalam laporan.⁷⁶

d. Agama dan Kepercayaan:

Agama dan kepercayaan berperan besar dalam budaya masyarakat. Kebijakan pendidikan harus memperhatikan sensitivitas terhadap nilai-nilai agama dan kepercayaan yang berlaku di wilayah tersebut.⁷⁷ Dalam kebijakan pendidikan, sangat penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai agama dan kepercayaan yang berlaku di wilayah tersebut. Hal ini dapat dicapai dengan memasukkan materi yang relevan ke dalam kurikulum, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan di lingkungan sekolah, dan memfasilitasi percakapan antara agama dan antarkepercayaan.

e. Pemenuhan Harapan Masyarakat:

Kebijakan pendidikan harus memenuhi harapan masyarakat terhadap sistem pendidikan, seperti kualitas pendidikan, kesempatan belajar, dan tujuan. Penyesuaian kurikulum adalah salah satu cara untuk memenuhi harapan tersebut. Kurikulum adalah pedoman dunia pendidikan yang dirancang untuk memperlancar pembelajaran. Kurikulum akan berubah sesuai dengan perubahan sosial, jadi pemegang kebijakan pendidikan nasional harus mengubah kurikulum

⁷⁶ Firman., Firman. Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik Bidang Pendidikan di Kabupaten Jombang. (2020). *Jurnal* dikutip dari <https://www.semanticscholar.org/paper/a240391b5534f0c2ba3691726fe24d8da3d4d06e> pada Pukul. 14.44 WIB Tanggal 19 September 2023 di Wonosobo.

⁷⁷ Dewantara, J. A., & Nurgiansah, T. H. Building Tolerance Attitudes of PPKN Students Through Multicultural Education Courses. *Jurnal Etika Demokrasi*, 6(1), (2021). 103–115.

untuk menjawab tantangan dunia pendidikan.⁷⁸ Selain itu, kebijakan pendidikan juga harus memperhatikan kompetensi sosial guru dalam berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua peserta didik serta masyarakat.

f. Perubahan Sosial dan Demografis:

Perubahan sosial dan demografis, seperti perubahan jumlah penduduk, kualitas penduduk, dan lingkungan, dapat memengaruhi tuntutan pendidikan dalam budaya yang selalu berubah. Kebijakan pendidikan harus beradaptasi dengan perubahan ini. Kebijakan pendidikan harus menyesuaikan diri dengan perubahan ini karena mereka dapat memicu kebutuhan akan lebih banyak sekolah, program pendidikan yang lebih baik, dan inovasi dalam proses pendidikan. Salah satu cara untuk mencapai responsivitas adalah dengan melakukan analisis menyeluruh terhadap kondisi dan perkembangan penduduk, serta kebijakan pro-rakyat terkait dengan berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan pengendalian penduduk. Selain itu, penting juga untuk memahami dampak perubahan sosial dan demografis terhadap lingkungan fisik, ekonomi,

⁷⁸ Zakiyatul Abidah, & Rohmatun Nurul Hidayah. تطبيع تطوير مناهج التعليم الأساسي. *Kilmatuna: Journal Of Arabic Education*, 2(2) (2022), 303–316. <https://doi.org/10.55352/pba.v2i2.81>

sosial, dan budaya di suatu wilayah, dan untuk mengarahkan kebijakan dasar pembangunan.⁷⁹

Dalam kesimpulannya, pengambilan kebijakan pendidikan di sekolah tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya masyarakat di sekitarnya. Memahami dampak sosial budaya ini adalah langkah penting dalam merancang kebijakan pendidikan yang relevan, efektif, dan diterima oleh masyarakat. Tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mengintegrasikan implikasi sosial budaya masyarakat dalam kebijakan pendidikan di sekolah.

6. Partisipasi Masyarakat dan Kolaborasi dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan di Sekolah

a. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan di sekolah.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sekolah sangat penting karena dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mempercepat pencapaian tujuan bersama.⁸⁰ Berikut adalah beberapa

⁷⁹ Junaidi & Junaidi. Analisis Kuantitas dan Kualitas Penduduk sebagai Modal Dasar dan Orientasi Pembangunan di Provinsi Jambi. figshare. *Journal Contribution*, 2016. 32. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.1439648.v1>

⁸⁰ Supriatna, Encup. "Inisiatif Partisipasi Sosial dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah: Studi Kasus pada Jaringan Kerja dan Kolaborasi antara Lembaga Pemerintah, LSM, dan Masyarakat Sipil di Indonesia." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* Vol. 17, No. 3 (2023): 1828-1848.

manfaat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sekolah⁸¹:

- 1) Memperlancar jalannya program sekolah.
- 2) Adanya rasa memiliki yang kuat terhadap sekolah.
- 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.
- 4) Memperkuat kapasitas dan sumber daya sekolah.
- 5) Mempercepat pencapaian tujuan bersama.

Berbagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang sekolah termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi. Faktor-faktor yang mendukung partisipasi masyarakat termasuk hubungan yang baik dengan sekolah, kepedulian orang tua yang tinggi, komitmen sekolah yang tinggi, koordinasi yang baik dengan komite sekolah, keterbukaan sekolah, dan dukungan orang tua yang kuat. Di sisi lain, faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat termasuk orang tua yang kurang paham, keterbatasan waktu orang tua, kurangnya pemahaman orang tua tentang anak-anak mereka, dan kesibukan orang tua.⁸²

⁸¹ Marasabessy, A., & Muhammad, S. Partisipasi Masyarakat Sekolah. *JURNAL PENDAS (Pendidikan Sekolah Dasar)*, 2(2), (2020). 25-31. Retrieved from <https://jurnal.stkipkieraha.ac.id/index.php/pendas/article/view/108>

⁸² Supriatna, Encup. "Inisiatif Partisipasi Sosial dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah: Studi Kasus pada Jaringan Kerja dan Kolaborasi antara Lembaga Pemerintah, LSM, dan Masyarakat Sipil di Indonesia." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* Vol. 17, No. 3 (2023): 1828-1848.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan sekolah atau lembaga pendidikan agar partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan semakin baik, antara lain⁸³:

- 1) Menjalin Komunikasi yang Efektif dengan Orang Tua dan Masyarakat.
- 2) Melibatkan Masyarakat dan Orang Tua dalam Program Sekolah
- 3) Mengundang Masyarakat dalam Rapat Tahunan Sekolah

b. Model Kolaborasi antara Sekolah dan Masyarakat

Partisipasi dapat dibagi kedalam beberapa bentuk. Menurut Basrowi menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat ditinjau dari bentuknya dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Partisipasi secara fisik, dimana partisipasi ini merupakan partisipasi yang dilakukan dalam bentuk menyelenggarakan sebuah pendidikan maupun usaha-usaha. Seperti usaha sekolah, membuat beasiswa, dan juga membantu pemerintah dengan cara membangun gedung untuk masyarakat atau dapat juga bentuk bantuan yang lain.
- 2) Partisipasi secara non fisik, merupakan partisipasi yang melibatkan masyarakat dalam menentukan tujuannya. Seperti dimana harus menempuh pendidikan nasional dan juga

⁸³ Normina. Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan* Volume 14 No.26 Oktober 2016. 71-85.

meratanya wawasan maupun keinginan masyarakat untuk menuntut ilmu dengan cara melalui pendidikan. Sehingga pemerintah tidak kesulitan dalam memberikan arahan kepada masyarakat untuk bersekolah.⁸⁴

Sedangkan Davis dalam jurnal yang ditulis oleh Anthonius Ibori berpendapat bahwa partisipasi masyarakat dibagi kedalam beberapa bentuk, yaitu :

- 1) partisipasi dalam bentuk pikiran, ide atau gagasan.
- 2) Partisipasi dalam bentuk tenaga
- 3) Partisipasi dalam bentuk pikiran dan juga tenaga.
- 4) Partisipasi dalam bentuk keahlian.
- 5) Partisipasi dalam bentuk barang.
- 6) Partisipasi dalam bentuk uang⁸⁵

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dibagi menjadi beberapa bentuk diantaranya adalah : partisipasi dalam bentuk pikiran, partisipasi dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk pikiran dan tenaga, partisipasi dalam bentuk keahlian, partisipasi dalam bentuk barang dan partisipasi dalam bentuk uang.

⁸⁴ Dwiningrum, S. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis dan Empirik*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2011. 57-58

⁸⁵ Anthonius Ibori. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tembuni Distrik Tembuni Kabupaten Teluk Bintuni. *Jurnal Governance* Vol. 5 No. 1 (2013). 161-171.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan manajemen dengan fokus pada proses dan strategi yang diterapkan dalam pengambilan keputusan kebijakan pendidikan di MI Ma'arif Ngadikerso. Pendekatan ini berupaya untuk mengkaji secara mendalam bagaimana sosial budaya masyarakat mempengaruhi praktik manajemen pendidikan dan pengambilan keputusan kebijakan. Dalam konteks ini, penelitian akan mengeksplorasi berbagai aspek manajemen termasuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, di mana peneliti mengumpulkan data lapangan dari lingkungan sekolah atau lembaga pemerintah. Penelitian dengan pendekatan kualitatif, berpusat pada prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gejala sosial. Penelitian kualitatif dapat menghasilkan data deskriptif tentang perilaku dan ucapan orang yang diteliti, menurut definisi Bogdan dan Taylor. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mencoba memecahkan masalah dengan data empiris. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena model ini cocok untuk menyelesaikan gejala sosial.⁸⁶

2. Lokasi Penelitian

MI Ma'Arif Ngadikerso beralamat di Dusun Sembir Rt 2 Rw 5, Ngadikerso, Kec. Sapuran, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah.

⁸⁶ Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

3. Subjek Penelitian

Dalam menentukan informan penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam mengambil sampelnya. Adapun pertimbangan-pertimbangan pemilihan informan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Sekolah: Kepala sekolah adalah pemimpin di sekolah dan memiliki wawasan langsung tentang bagaimana pengambilan keputusan kebijakan berlangsung di lingkungan sekolah. Mereka dapat memberikan perspektif manajemen pendidikan dan tantangan yang mereka hadapi dalam mengimplementasikan kebijakan.
- b. Guru dan Tenaga Pendidik: Guru adalah pihak yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran dan implementasi kebijakan di kelas. Mereka dapat berbicara tentang dampak kebijakan terhadap proses belajar-mengajar serta bagaimana nilai-nilai budaya memengaruhi pendidikan di kelas.
- c. Orang Tua/Wali Murid: Orang tua/wali murid memiliki peran penting dalam pendidikan anak-anak mereka. Mereka dapat memberikan wawasan tentang bagaimana mereka melihat kebijakan pendidikan yang diimplementasikan di sekolah dan dampaknya terhadap anak-anak mereka.
- d. Anggota Dewan Sekolah: Anggota dewan sekolah atau komite

sekolah seringkali terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan di tingkat sekolah. Mereka dapat memberikan perspektif tentang bagaimana kebijakan dibuat dan diimplementasikan.

- e. Perwakilan Masyarakat Lokal: Memperoleh pandangan dari anggota masyarakat lokal atau kelompok etnis tertentu yang berkontribusi pada keragaman budaya di wilayah sekolah dapat membantu memahami bagaimana nilai-nilai budaya masyarakat memengaruhi pendidikan.

4. Sumber Data

Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, dan penjelasan tentang kedua jenis data tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Data utama dari penelitian ini dikenal sebagai data primer. Data ini dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian atau informan. Peneliti memilih informan untuk masalah penelitian. Penelitian ini mengumpulkan data dari guru, kepala sekolah, komite sekolah, orangtua/wali murid, dan masyarakat setempat.
- b. Selain menggunakan data primer, peneliti juga membutuhkan data sekunder untuk mendukung atau menentukan keabsahan data primer. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari dokumen, buku, jurnal, dan sumber lain yang dapat membantu kelengkapan data primer atau penelitian agar penelitian ini berhasil dan sesuai dengan keadaan di lapangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian kualitatif umumnya seperti yang peneliti sebagai berikut:

- a. Observasi yang dilakukan peneliti adalah mengamati secara langsung atau tidak langsung kepada hal hal yang berkaitan atau ber korelasi dengan dampak sosial budaya masyarakat dan manajemen pendidikan terhadap pengambilan keputusan kebijakan di MI Ma'arif Ngadikerso.
- b. Wawancara yang dilaksanakan pada penelitian ini peneliti menggunakan dua bentuk wawancara yaitu wawancara Terstruktur dan wawancara semi struktur. Maka dari itu wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan harus ber korelasi dengan dampak sosial budaya masyarakat dan manajemen pendidikan terhadap pengambilan keputusan kebijakan di MI Ma'arif Ngadikerso.
- c. Dokumentasi, merupakan proses pencarian data yang berupa catatan, transkrip, surat kabar majalah, buku dan sebagainya. Teknik dokumentasi ini dilaksanakan oleh peneliti guna membantu proses penelitian di mana menurut peneliti tidak semua data dapat dicari atau ditemukan melalui observasi dan wawancara saja.

6. Keabsahan Data

Teknik Triangulasi biasanya digunakan untuk memeriksa sumber lain. Ini adalah pemeriksaan keabsahan data peneliti dengan menggunakan

sesuatu yang lain di luar data untuk tujuan pengecekan atau sebagai perbandingan dengan data yang telah diperoleh. Triangulasi sendiri dilakukan melalui observasi langsung, wawancara, dan observasi tidak langsung. Observasi tidak langsung digunakan untuk mengamati beberapa peristiwa yang terjadi selama pengamatan. Hasil observasi ini akan digunakan untuk membuat alur intisari dan menghubungkan antara data primer dan data sekunder. Observasi dan wawancara adalah komponen dari metode pengumpulan data yang digunakan.

7. Teknik Analisis Data

Data analisis atau teknik analisis data yang peneliti gunakan, yaitu Menggunakan teori Milles Huubermen dan Saldana.⁸⁷ Yaitu menganalisis data menggunakan tiga langkah, antara lain: kondensasi data (*data condensation*), menyajikan data (*data display*), serta membuat kesimpulan atau verifikasi (*conclusion, drawing, and verification*). Kondensasi data yang dilakukan adalah proses pemilihan atau seleksi pengerucutan penyederhanaan Ringkasan dan Transformasi data. Adapun langkah langkah teori Milles, Huberman dan Saldana Peneliti jabarkan sebagai berikut:

a. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Peneliti menggabungkan data yang di peroleh dari wawancara observasi dan dokumentasi dengan merangkumnya, memilihnya,

⁸⁷ Andi Misna. Formulasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Kandolo Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur .*eJournal Administrasi Negara*, ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.ac.id. 3 (2) 2015 : 521 – 533.

dan memfokuskannya pada tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti menggabungkan data dengan memilih mengkonotasi, dan membuat deskripsi dari catatan lapangan wawancara dan dokumentasi.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah melakukan kondensasi atau perangkuman data, peneliti kemudian menyampaikan data yang mereka peroleh melalui observasi dan dokumentasi wawancara. Peneliti menyajikan data mereka dalam bentuk catatan dokumentasi, catatan wawancara, dan catatan lapangan. Kemudian mengorganisasi data dengan kode atau tanda sehingga mudah dan cepat untuk menganalisisnya. Peneliti membuat daftar kode awal untuk penelitian, termasuk pedoman wawancara, dokumentasi, dan observasi. Setelah data refleksi diberi tanda atau kode analisis, peneliti menyajikan data dalam bentuk deskripsi atau teks.

c. Kesimpulan, Penarikan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah terakhir dalam teknik analisis data penelitian ini adalah membuat kesimpulan. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diuji, peneliti akan membuat kesimpulan yang mendukung solusi masalah. Kesimpulan ini didukung oleh bukti kuat dari proses pengumpulan data.⁸⁸

⁸⁸ .Andi .Misna. .Formulasi .Kebijakan .Alokasi .Dana .Desa .Di .Desa .Kandolo .Kecamatan .Teluk .Pandan .Kabupaten .Kutai .Timur ..*eJournal .Administrasi .Negara*, .ISSN .0000-0000, .*ejournal.an.fisip-unmul.ac.id*. 3 .(2) .2015 .: . .527-528. .

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian adalah bagian dari struktur penyajian hasil penelitian di dalam laporan penelitian. Ini adalah bagian di mana peneliti membahas hasil penelitian, menganalisis temuan-temuan, dan mengaitkannya dengan kerangka teoritis, tujuan penelitian, serta pertanyaan penelitian yang diajukan.

BAB I PENDAHULUAN Dalam bab ini, pembaca akan diperkenalkan pada konteks umum penelitian, termasuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Selain itu, bab ini juga menyajikan kajian pustaka dan teoritis yang menjadi landasan bagi penelitian, termasuk konsep sosial budaya masyarakat, manajemen pendidikan, dan kebijakan pendidikan di sekolah.

BAB II GAMBARAN UMUM MIS MAARIF NGADIKERSO Pada bab ini, pembaca akan diberikan gambaran umum tentang Madrasah Ibtidaiyah Maarif Ngadikerso, mencakup letak geografis, sejarah pendirian, serta visi, misi, dan tujuan yang diemban oleh madrasah tersebut. Selain itu, data madrasah juga akan dipaparkan untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang institusi tersebut.

BAB III SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DESA NGADIKERSO
Bab ini menjelaskan berbagai aspek sosial dan budaya masyarakat Desa Ngadikerso. Adapun bentuknya adalah: Gotong Royong, PHBI (Peringatan

Hari Besar Islam), Hari Pasaran, Kegiatan Keagamaan seperti pengajian dan tahlilan, Karnaval, serta Mata Pencarian warga.

BAB IV PROSES PENGAMBILAN KEBIJAKAN DI MI MA'ARIF NGADIKERSO Bab ini fokus pada Manajemen Pendidikan MI Ma'arif Ngadikerso didasarkan pada pendekatan yang memperhatikan kebutuhan lokal serta budaya setempat dan proses Pengambilan Kebijakan di lembaga ini melibatkan berbagai pihak untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan komunitas.

BAB V IMPLIKASI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT TERHADAP PENGAMBILAN KEBIJAKAN DI MI MA'ARIF NGADIKERSO Bab ini membahas pengaruh sosial budaya masyarakat Ngadikerso terhadap kebijakan di MI Ma'arif Ngadikerso. Antara lain: nilai-nilai dan tradisi lokal, bahasa dan komunikasi, partisipasi masyarakat, agama dan kepercayaan, pemenuhan harapan masyarakat, dan perubahan sosial dan demografis.

BAB VI PENUTUP Pada bab terakhir ini, kesimpulan dari penelitian akan diuraikan, termasuk temuan-temuan penting dan implikasinya. Selain itu, saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian juga akan disampaikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Maarif Ngadikerso.

DAFTAR PUSTAKA Terakhir, daftar pustaka akan mencantumkan referensi yang digunakan dalam penelitian ini, memberikan pembaca akses

untuk melacak sumber-sumber yang dijadikan acuan.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk sosial budaya di Desa Ngadikerso ditandai dengan adanya Nilai-nilai gotong royong dalam berbagai kegiatan seperti pembangunan jalan dan perayaan hari besar Islam seperti Maulid Nabi dan Rajaban. Tradisi lokal seperti hari pasaran dan karnaval HUT RI juga memainkan peran penting dalam kehidupan sosial mereka, memperkuat solidaritas dan rasa kebersamaan. Praktik-praktik keagamaan seperti sholawat, ziarah, tahlilan, dan yasinan mempererat ikatan keagamaan dan sosial, sementara mata pencaharian utama sebagai petani kebun di kaki Gunung Sumbing menciptakan struktur sosial yang khas.
2. Pengambilan keputusan kebijakan di MI Ma'arif Ngadikerso dilakukan secara sistematis, dimulai dari perumusan masalah, penentuan prediksi, hingga evaluasi kinerja kebijakan. Proses ini dimulai dengan identifikasi dan pendefinisian masalah yang mencakup analisis mendalam dan spesifikasi masalah terkait kurikulum, fasilitas, serta tantangan sosial budaya. Prediksi kebijakan dilakukan melalui analisis normatif, rasional/empiris, dan evaluatif untuk memastikan relevansi dan dampak positif kebijakan. Rekomendasi kebijakan dievaluasi berdasarkan efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan ketepatan. Implementasi kebijakan didokumentasikan dan dimonitor

secara sistematis, melibatkan eksperimen sosial dan umpan balik dari pemangku kepentingan. Evaluasi kinerja kebijakan dilakukan secara berkala dengan metode evaluasi semu, formal, dan teoretis untuk memastikan efektivitas serta perbaikan berkelanjutan, dengan keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan.

3. Implikasi sosial budaya terhadap pengambilan kebijakan pendidikan di MI Ma'arif Ngadikerso memerlukan perhatian terhadap berbagai aspek yang ada di masyarakat. Dengan memahami nilai-nilai dan tradisi lokal, bahasa dan komunikasi, partisipasi masyarakat, agama dan kepercayaan, pemenuhan harapan masyarakat, serta perubahan sosial dan demografis, kebijakan pendidikan dapat dirancang secara komprehensif dan efektif. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pendidikan tetapi juga memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat, sehingga menghasilkan peserta didik yang unggul dan berkarakter.

B. Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya, akademisi dapat mengambil pendekatan studi longitudinal dan analisis perbandingan untuk melacak dampak kebijakan pendidikan MI Ma'arif Ngadikerso, membandingkannya dengan sekolah-sekolah serupa, serta memeriksa aspek manajemen pendidikan yang mendalam. Evaluasi lebih lanjut tentang inklusivitas kebijakan pendidikan, serta partisipasi masyarakat dan keterlibatan orang tua, akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang

efektivitas kebijakan dan peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pendidikan di MI Ma'arif Ngadikerso.

2. Untuk MIS Ma'arif Ngadikerso, saran untuk penelitian atau inisiatif yang dapat dipertimbangkan meliputi evaluasi internal secara berkala untuk menilai efektivitas kebijakan, kolaborasi dengan institusi pendidikan lain untuk pertukaran pengetahuan, investasi dalam pelatihan staf untuk peningkatan kualitas pengajaran, serta kerjasama dalam penelitian tindakan bersama dengan akademisi untuk mengatasi tantangan dalam pendidikan mereka. Selain itu, penting juga untuk terus memperkuat keterlibatan masyarakat melalui program-program yang mendorong partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan pendidikan, menjaga transparansi dalam pengelolaan komite sekolah, dan meningkatkan efektivitas program keterlibatan orang tua.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Zakiyatul & Rohmatun Nurul Hidayah. (2022). تطبيق تطوير مناهج التعليم الأساسي. *Kilmatuna: Journal Of Arabic Education*, 2(2) Hal 303–316. <https://doi.org/10.55352/pba.v2i2.81>
- Ahmadi, A., & El Widdah, M. (2023). Analisis Kebijakan Pendidikan Islam (Suatu Kajian Studi Letaratur Manajemen Pendidikan). *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, 4(1), Hal 104–113. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1.1376>
- Anastasia Arum Sari Dyahningtyas, Muthmainah, (2023). “Proyek Karnaval HUT Republik Indonesia sebagai Penguatan Profil Pelajar Pancasila,” *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 7, no. 2 Hal 2024–2036, doi:10.31004/obsesi.v7i2.4075.
- Armen, 2015. *Buku Ajar Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Cet. 1: Yogyakarta; Deepublish,
- Bangkara, B. A., Pattiasina, P. J., Fatmawati, E., Heryani, A., & Damayanto, A. (2022). Relevance of education policy and implementation in Indonesia: A study of the public service literature. *Linguistics and Culture Review*, Vol 6 No (S5), Hal 216-232.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta.
- Cahyani, Nur and Sumarlin Mus. “Pengambilan Keputusan Kepala Sekolah Melalui Pendekatan Manajemen Strategik Di SMK Negeri 4.” *Jurnal Administrasi, Kebijakan, dan Kepemimpinan Pendidikan (JAK2P)* Volume [2] No. [1] Juni 2021. Hal 92-103.
- Deden Makbuloh. 2010. *Manajemen Mutu Pendidikan Islam*. Jakarta, Raja Grafindo Persada,
- Depdiknas, 2001. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Bukul, Konsep dan Pelaksanaan*. Jakarta. Balitbang. Depdiknas
- Depdiknas. 2007. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Konsep dan Pelaksanaan*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen.
- Dermawan, Rizky. 2004. *Pengambilan Keputusan: Landasan Filosofi, Konsep, dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta)
- Dewantara, J. A., & Nurgiansah, T. H. (2021). Building Tolerance Attitudes of PPKN Students Through Multicultural Education Courses. *Jurnal Etika Demokrasi*, 6(1), Hal 103–115.
- Dewantara, J. A., & Nurgiansah, T. H. (2021). Building Tolerance Attitudes of PPKN Students Through Multicultural Education Courses. *Jurnal Etika Demokrasi*, 6(1), Hal 103–115.

- Dikutip dari <https://website.wonosobokab.go.id/category/detail/kecamatan-sapuran> pada 19 September 2023 pukul 19.35 WIB di Wonosobo.
- Dikutip dari web data.sekolah-kita.net pada Hari Rabu 8 Mei Pukul 21.30 di Kabupaten Wonosobo
- Dikutip dari web Pemkab Wonosobo pada Hari Rabu 8 Mei Pukul 21.18 di Kabupaten Wonosobo
- Dikutip dari web sekolah.data.kemdikbud.go.id/index.php/chome/profil/D17F0BDC-E00C-4CC9-89BA-B3B62B8B78BE pada Hari Rabu 8 Mei Pukul 21.00 di Kabupaten Wonosobo
- Dokumen RKTMM MIS Ma'arif Ngadikerso Sapuran Tahun 2023/2024
- Dokumen Visi, Misi, dan Tujuan MIS Ma'arif Ngadikerso
- Dulkiah, Moh & Sarbini. 2020. *Sosiologi Pendidikan*. Bandung: LP2M UIN SGD Bandung.
- Dwiningrum, S. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis dan Empirik*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar, Hal 57-58
- F, Nurmadhani Suyuthi, dkk., 2020. *Dasar-Dasar Manajemen: Teori, Tujuan, dan Fungsi*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis,.
- Fadilah, Laila Rahmawati, et al. (2023). "Implementasi manajemen pendidikan dalam pelaksanaan fungsi manajemen di lembaga pendidikan islam." *QALAM: Jurnal Pendidikan Islam* Vol 4, No 2: 1-9. P-ISSN: 2745-844X, e-ISSN: 2745-8245.
- Fathih, M. A., & Muhlis, N. K. (2023). Problematika Penerapan Manajemen Pendidikan di Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Dirasah*, 6(1), Hal 20-29. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/dirasah>
- Fatmawati, Erma. 2019. Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Peran Birokrasi Dan Partisipasi Masyarakat. *JIEMAN: Journal of Islamic Educational Management* Vol. 1, No. 1, Desember. Hal 58-76.
- Firman., Firman. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik Bidang Pendidikan di Kabupaten Jombang.. *Jurnal dikutip dari* <https://www.semanticscholar.org/paper/a240391b5534f0c2ba3691726fe24d8da3d4d06e> pada Pukul. 14.44 WIB Tanggal 19 September 2023 di Wonosobo.
- Ganarditya, M. (2021). Pengaruh Kearifan Lokal Terhadap Pelayanan Publik (Studi Kasus Penyelewengan Dana Bansos). *CENDEKIA Jaya*, 3(2), Hal 10-19. <https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v3i2.185>
- Hamdani, D. (2012). *Cultural System of Cirebonese People: Tradition of Maulidan in the Kanoman Kraton*. Unpublished Master's Thesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia.

- Hayati, Fitriah, Riri Zulvira and Nurhizrah Gistituati. 2021. "Lembaga pendidikan: kebijakan dan pengambilan keputusan." *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* Vol.6, No.1, Hal 100-104
- Hidayat, Ara dan Imam Machali, *Pengelolaan Pendidikan*, Yogyakarta: Kaukaba, 2012, hal 13
- Huraerah, Abu 2011. *Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- I Putu Widyanto. (2019). Partisipasi masyarakat dalam perkembangan pendidikan melalui manajemen berbasis sekolah (MBS). *Jurnal Satya Sastraharing* Vol 03 No. 02. Hal 93-112.
- Ibori, Anthonius. (2013). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tembuni Distrik Tembuni Kabupaten Teluk Bintuni. *Jurnal Governance* Vol. 5 No. 1. Hal 161-171.
- Irfan, Muhammad dan Abdul Rahman and Latri Aras. (2023). "Makin Dekat, Makin Cepat: Pengaruh Pokja Manajemen Operasional dalam Implementasi Program Sekolah Penggerak." *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan* 7(1): Hal 11–18. <https://doi.org/10.23887/jppp.v7i1.56914>
- Junaidi & Junaidi. (2016). Analisis Kuantitas dan Kualitas Penduduk sebagai Modal Dasar dan Orientasi Pembangunan di Provinsi Jambi. *Journal Contribution*, Hal 28-37.
- Junaidi & Junaidi. 2016. Analisis Kuantitas dan Kualitas Penduduk sebagai Modal Dasar dan Orientasi Pembangunan di Provinsi Jambi. figshare. *Journal Contribution*, Hal 32. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.1439648.v1>
- KBBI. 2006. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN),
- Kistanto, N. H. 2008. Sistem Sosial-Budaya di Indonesia. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, vol. 3, no. 2, Oct.. <https://doi.org/10.14710/sabda.3.2.%p>
- Kiwang, Amir Syarifudin, David B. W. Pandie and Frans Gana. 2015. "Analisis Kebijakan dan Efektivitas Organisasi." *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik JKAP* Vol 19 No 1 - Mei. Hal 71-84
- Koentjaraningrat. (1980). *Masyarakat Pedesaan di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kunperdana. (2018). "analisis kurikulum 2013 ditinjau dari aspek nilai karakter bangsa." *Jurnal benchmarking: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* Vol 2, No 2 (2018). Hal 28-36
- Kusuma, M. T. A. (2023). Peran Manajemen Pendidikan Sekolah Dalam Pengembangan Hubungan Manusia Ditinjau Dari Perspektif Pendidikan Islam. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2), Hal 172–182. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v1i2.212>

- Lestari, S., & Salminawati. (2021). Analisis Kebijakan Pendidikan MI Perspektif Lingkungan Pendidikan Sekolah/Madrasah. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), Hal 118-129.
- Makbuloh, Deden. 2010. *Manajemen Mutu Pendidikan Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
- Marasabessy, A., & Muhammad, S. (2020). Partisipasi Masyarakat Sekolah. *JURNAL PENDAS (Pendidikan Sekolah Dasar)*, 2(2), Hal 25-31. Retrieved from <https://jurnal.stkipkieraha.ac.id/index.php/pendas/article/view/108>
- McLeod, R & George P. Schell, *Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Misna, Andi. 2015. Formulasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Kandolo Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur .*eJournal Administrasi Negara*, ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.ac.id. 3 (2). Hal 521 – 533.
- Mubyarto. (1993). *Dinamika Pembangunan Desa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mulyasa, E. 2004. *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustari, Mohammad 2014. *Manajemen Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Musyarofah. (2021). “Pendidikan Agama Sebagai Dasar Dalam Membangun Ketahanan Keluarga.” *Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol. 8 No. 02 . Hal 1-18.
- Neprializa. (2015). Manajemen Budaya Sekolah. *Jurnal Manajer Pendidikan*, Volume 9, Nomor 3, Juli, hal 419-429
- Neprializa. 2015. Manajemen Budaya Sekolah. *Jurnal Manajer Pendidikan*, Volume 9, Nomor 3, Juli, hal 419-429.
- Normina. 2016. Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan* Volume 14 No.26 Oktober. Hal 71-85.
- Nurdin, Diding and Sofyan Sauri. 2012. “Model Manajemen Pendidikan Nilai Berbasis Sekolah, Keluarga, Dan Masyarakat.” *Jurnal Administrasi Pendidikan* VolXIV No. J April. Hal 185-196.
- Octaviani, Utari. (2019). “Keterampilan Kepala Sekolah Dalam Proses Pengambilan Keputusan.” *Jurnal*. Hal 1-7.
- Patras, Yuyun Elizabeth, Agus Iqbal, Papat Papat and Yulianis Safrinadiya Rahman. 2019. “Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah Dan Tantangannya.” *Jurnal Manajemen Pendidikan* Vol.7, No.2, Juli. Hal 800-807.

- Permana, Ibar Adi and Jajat Sudrajat. 2022. "Pengelolaan Manajemen dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Mutu Pendidikan." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5(5). Hal 1479-1487.
- Pitri, Alisyah, et al. (2022). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendidikan Islam: Paradigma, Berpikir Kesisteman Dan Kebijakan Pemerintah (Literature Review Manajemen Pendidikan)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*. Volume 2, Issue 1: 23-40.
- Pitri, Alisyah, Hapzi Ali and Kasful Anwar Us. (2022). "Faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan islam: paradigma, berpikir kesisteman dan kebijakan pemerintah (literature review manajemen pendidikan)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* Volume 2, Issue 1: Hal 23-40.
- Pratama, Rheza. 2020. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish Publisher,
- Purwaningsih, I., Marliansyah, I. S., & Rukiyah, S. (2022). Analisis Manfaat Penggunaan Media Sosial sebagai Media Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam Meningkatkan Prestasi Siswa. *Jurnal Visionary: Penelitian dan Pengembangan di Bidang Administrasi Pendidikan*, 10(2), Hal 19-27. <https://e-journal.undikma.ac.id/index.php/visionary>
- Rochaery, Eti dkk. 2006, *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara.
- Rosita, Isa, Gunawan and Desi Apriani. (2020). "Penerapan Metode Moora Pada Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Media Promosi Sekolah (Studi Kasus: SMK Airlangga Balikpapan)." *METIK JURNAL VOLUME. 4 NOMOR. 2*: Hal 55-61.
- Rosyida, Isma & Fredian Tonny Nasdian. 2011. Partisipasi Masyarakat Dan Stakeholder Dalam Penyelenggaraan Program Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Dampaknya Terhadap Komunitas Perdesaan. *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia* April. Hal 51-70.
- Sabri, Ahmad 2013. Kebijakan dan Pengambilan Keputusan dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Al-Ta'lim*, Jilid 1, Nomor 5, Juli. Hal 373.
- Sakjoyo, Pudjiwati (2009). *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Pustaka Jaya.
- Salam, Nur Firas Sabila, Abdul Manap Rifai and Hapzi Ali. 2021. "faktor penerapan disiplin kerja: kesadaran diri, motivasi, lingkungan (suatu kajian studi literatur manajemen pendidikan dan ilmu sosial)." *Jurnal manajemen pendidikan dan ilmu sosial* Volume 2, Issue 2, Juli. Hal 487-508.
- Samsiah, S., Ibrahim, M., & Musdalifah, M. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Maroanging Kabupaten Bulukumba. *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2). Hal 171-181. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/elidare.v4i2.3646>

- Sandiningtyas, Herawati dan Bambang Budi Wiyono. 2018. Pendidikan Berbasis Budaya Lokal Suku Boti: Studi Kasus di SDN-SMPN Satu Atap Oefau Desa Boti Nusa Tenggara Timur. Ilmu Pendidikan: *Jurnal Kajian Teori dan Praktik Kependidikan* Volume 3, Nomor 1, Juni. Hal 77-82.
- Sanjaya, Ivan, Suswandari Suswandari and Rudy Gunawan. 2020. “Nilai-nilai tradisi budaya Cap Go Meh pada masyarakat Cina Benteng di Tangerang sebagai sumber pembelajaran di sekolah.” *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 6(2), Hal 385–402.
- Sari, Rita Karmila. 2017. Persepsi Pengajar Dan Pemelajar Terhadap Penggunaan Teknologi Dalam Pengajaran Bahasa Inggris. *Jurnal SAP* Vol. 1 No. 3 April. Hal 333-343.
- Setiadi, Elly dan Kama Abdul Hakam. 2016. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar Cet 3*. Jakarta; Kencana.
- Setyaningrum, Rizqi Amalia, Anita Trisiana and Adityar Kirana. (2021). “Geostrategi Indonesia Melalui Pendekatan Kesejahteraandalam Konsepsi Ketahanan Nasional Di Bidangekonomi.” *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan JGC X* (1). Hal1-11.
- Setyanto, Eddy and Matin, Totok Amin Soefijanto. 2019. Evaluation of Culture-Based Education Policy Implementation and Management at High School. *Internetonial Journal of Advanced Research (IJAR)* 7(11) Hal 633-641. DOI: 10.21474/IJAR01/10051
- Subiyantoro. (2013). Pengembangan Model Pendidikan Nilai Humanis-Religius Berbasis Kultur Madrasah. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 4(3), 326-320.
- Sondang, Siagian P. 1980 *Sistem Informasi untuk Pengambilan Keputusan*, (Jakarta: Gunung Agung)
- Sudiyono. (2008). “Perspektif Pendidikan Menengah Dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia.” *El Harakah* 5. Hal 33-41.
- Sudrajat. (2012). *Gotong Royong: Tradisi dan Modernitas*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suharto, Edi. 2010, *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman, H. (2021). Eksplorasi Etnomatematika pada Proses Penentuan Hari Sakral Desa Sambeng di Kabupaten Cirebon. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika*, 10(1), Hal 140-152.
- Sulistiyowati, Roro Dwi. 2021 Pengembangan Pariwisata Melalui Nilai Budaya Berwawasan Lingkungan Budaya, Paradigma Baru Simbiosis Mutualisme. *Jurnal Terapung : Ilmu – Ilmu Sosial* , Vol. 3, No. 1, Maret. Hal 26-33
- Sumarnie. (2019). Pengaruh Penggunaan Bahasa di Rumah dan Pendidikan Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Matematika Murid Kelas I SD Negeri

- Kecamatan Selat Kuala Kapuas. *Jurnal Pendidikan*, 20(2). Hal 112–123.
<https://doi.org/10.52850/jpn.v20i2.884>
- Sumarnie. (2019). Pengaruh Penggunaan Bahasa di Rumah dan Pendidikan Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Matematika Murid Kelas I SD Negeri Kecamatan Selat Kuala Kapuas. *Jurnal Pendidikan*, 20(2), Hal 112–123.
<https://doi.org/10.52850/jpn.v20i2.884>
- Supardan, Dadang. 2008. *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Supriatna, Encup. (2023) “Inisiatif Partisipasi Sosial dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah: Studi Kasus pada Jaringan Kerja dan Kolaborasi antara Lembaga Pemerintah, LSM, dan Masyarakat Sipil di Indonesia.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* Vol. 17, No. 3: Hal 1828-1848.
- Suryadinata, Leo. (2005). *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Pustaka LP3: Yogyakarta.
- Syafaruddin & Anzhizan, 2008 *Sistem Pengambilan Keputusan Pendidikan*, (Jakarta: Grasindo).
- Syarifuddin, Syarifuddin. 2019 “Peran Budaya Maulid Dalam Merekatkan Hubungan Sosial Masyarakat Barabai Utara (Studi Deskriptif Analisis Terhadap Pengembangan Nilai-Nilai Budaya Pendidikan IPS).” *Jurnal Al-Madrasah Vol. 4, No. 1, Juli-Desember* : Hal125-140.
- Tintington, J. Y., Lumapow, H. R., & Rotty, V. N. J. (2023). Problematika dan Perubahan Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Educatio*, 9(2), Hal 798-809.
- Umar, Jusnimar. 2015. Peranan Nilai Sosial dalam Pengembangan Pendidikan Umum. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*. Vol 5 No 2. Hal 1-18.
- Umiati Jawas. 2017. The Influence of Socio-Cultural Factors on Leadership Practices For Instructional Improvement In Indonesian Schools. *Journal School Leadership & Management*, Hal 1-20. DOI: 10.1080/13632434.2017.1366440.
- Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Usman, Husaini. 2008. *Manajemen Teori Praktik & Riset Pendidikan*, Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Wawancara dengan Bapak Chamid Nur Efendhi Selaku Kepala Sekolah di MIS Maarif Ngadikerso pada tanggal 30 April 2024 di Dusun Sembir Desa Ngadikerso Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo
- Wawancara dengan Bapak Lukman Hakim selaku masyarakat setempat, Guru, dan Staf di MIS Maarif Ngadikerso pada tanggal 30 April 2024 di Dusun Sembir Desa Ngadikerso Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo

- Wawancara dengan Bapak Saefurrohman Selaku Ketua Komite di MIS Maarif Ngadikerso pada tanggal 30 April 2024 di Dusun Sembir Desa Ngadikerso Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo
- Wawancara dengan Ibu Sri selaku masyarakat setempat dan wali murid di MIS Maarif Ngadikerso pada tanggal 30 April 2024 di Dusun Sembir Desa Ngadikerso Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo
- Widyanto, I Putu. 2019. Partisipasi masyarakat dalam perkembangan pendidikan melalui manajemen berbasis sekolah (MBS). *Jurnal Satya Sastraharing* Vol 03 No. 02. Hal 93-112.
- Yamin, Moh. 2009. *Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan*, Yogyakarta: Diva Press.
- Yunitasari, D., Arnyana, I. B. P., & Dantes, N. (2023). Implementasi kebijakan pendidikan dasar (definisi, aktor pelaksana, konteks, jenis, dan langkah kebijakan). *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (IICETJPPI)*, 9(3), Hal 1506-1515. <https://doi.org/10.29210/0202312886>
- Yunus, Moh dan A. Risma Jaya, 2020. *Metode dan Model Pengambilan Keputusan (The Way to Success)*, (Indramayu: Penerbit Adab)
- Zakiyatul Abidah, & Rohmatun Nurul Hidayah. (2022). تطبيق تطوير مناهج التعليم الأساسي. *Kilmatuna: Journal Of Arabic Education*, 2(2) Hal 303–316. <https://doi.org/10.55352/pba.v2i2.81>